



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU**

Jl. Dang Merdu, Gg. Merdu
Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam
Kepulauan Riau (29465)

Telp : (0/61) 8441397
Fax : (0/61) 8441397

Email : bptdkepri@gmail.com
@bptdkls2kepri

NOTA DINAS

Nomor: 5/TU/BPTD-KEPRI/2025

Yth. : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau
Dari : Sub Bagian Tata Usaha
Perihal : Penyampaian Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
Tanggal : 31 Desember 2025

Menindaklanjuti tentang penyampaian Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa kami telah menyusun Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan, atas perkenan arahan Bapak Kepala Balai, kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mohamad Fauzan, S.E., M.M.Tr
NIP. 19840829 201001 1 008



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RENCANA STRATEGIS

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU
2025 - 2029**





Rencana Strategis 2025-2029
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kepulauan Riau Tahun 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis 2025-2029
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kepulauan Riau Tahun 2026

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Azira Salsabila, A.Md.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	31-12-2025	
2.	Dikonsep	Reyno Elvin Albarokah, S.Tr.Tra	Pengawas Transportasi Darat	31-12-2025	
3.	Dikonsep	Rufaida Ayu Dwiyanti, S.Tr.Tra	Pengawas Transportasi Darat	31-12-2025	
4.	Diperiksa	Mohamad Fauzan, S.E., M.M.Tr	Plt. Kasubbag Tata Usaha	31-12-2025	
5.	Disetujui	Mohamad Fauzan, S.E., M.M.Tr	Plt. Kasubbag Tata Usaha	31-12-2025	
6.	Disetujui	Wisnu Herlambang, S.AP., M.M.	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	31-12-2025	
7.	Disetujui	Frans Deddy Arisandy, S.SiT	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	31-12-2025	
8.	Disetujui	Mohamad Fauzan, S.E., M.M.Tr	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	31-12-2025	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat kami selesaikan.

Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No KP-DRJD 6887 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2025-2029.

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau untuk periode 5 (lima) tahun yakni mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Muatan kebijakan dan rencana aksi dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 ini, diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2025-2029 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Batam, 31 Desember 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Kepulauan Riau



Dini Kusumahati D., S.T., M.T.
NIP. 19800314 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau	6
1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau	6
1.1.2 Capaian RENSTRA Setditjen Perhubungan Darat 2020-2024	8
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	15
2.1 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	15
2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029	16
2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029	12
2.2 Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025 – 2029	16
2.3 Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	17
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029	14
2.3.2 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029	14
2.3.3 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029	14
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	36
3.3 Kerangka Regulasi	38
3.4 Kerangka Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024	40
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
4.1 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	42
4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Program	42
4.1.2 Target Keluaran (Output) Pelaksanaan Kegiatan	43
4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029	52

4.2.1	Kebutuhan Pendanaan	52
4.2.2	Skema Pendanaan	68
4.3	Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.....	68
BAB 5	PENUTUP.....	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Arahan Pimpinan	76
5.3	Mekanisme Evaluasi.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	6
Tabel 1.2	Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024	8
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan.....	19
Tabel 2.2	Manual Perhitungan Indikator Kegiatan	23
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	30
Tabel 3.2	Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	33
Tabel 3.3	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029	37
Tabel 3.4	Daftar kebutuhan penguatan regulasi pada periode 2025-2029	38
Tabel 4.1	Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen	42
Tabel 4.2	Target Keluaran (Output) RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	43
Tabel 4.3	Target Indikator dan Kerangka Pendanaan	53
Tabel 4.4	Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra Setditjen Perhubungan Darat ..	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan organisasi dan tata kerja.....	7
Gambar 2.1	VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029	15
Gambar 2.2	Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 - 2029.....	17
Gambar 3.1	Penataan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat	41

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau

Kondisi Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggambarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sebagai batasan ruang lingkup.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kepulauan Riau

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**

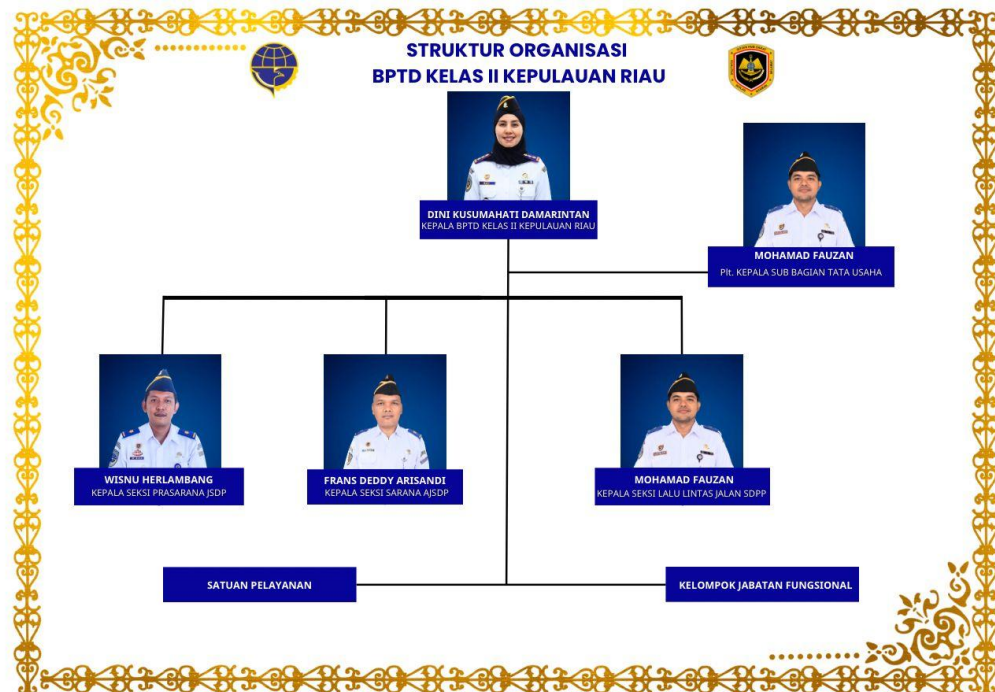
Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 4 TAHUN 2025
1	Kedudukan Balai Pengelola Transportasi Darat	Sekretariat Direktorat Perhubungan Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan dipimpin oleh seorang kepala.
2	Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat	Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat	- Penyusun rencana, program, dan anggaran; - Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; - Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan; - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan; - Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; - pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sumber: Pasal 1,2, dan 3 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut



Gambar 1.1 Susunan organisasi dan tata kerja

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat di atas, maka cakupan penyelenggaraan tugas Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan terminal tipe A, pelabuhan penyebrangan, serta unit penimbangan kendaraan bermotor, pengendalian keselamatan sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pengelolaan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan serta perairan darat, pengawasan penyelenggaraan transportasi darat, pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, dan evaluasi pelaporan. Dengan demikian, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat antara lain adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

1.1.2 Capaian RENSTRA Balai Pengelola Kelas II Kepulauan Riau 2020-2024

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Rencana Strategis (RENSTRA) BPTD Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 harus memperhatikan capaian dan permasalahan pada Rencana Strategis BPTD Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 memiliki 4 (Empat) Sasaran Kegiatan, sebagaimana berikut ini :

- SK 1** Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK 2** Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat
- SK 4** Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat
- SK 5** Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	REALISASI S.D 2023
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan <u>jalan</u>	%	100	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	11	10
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang <u>terhadap kondisi ideal</u>	%	100	100
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	25	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	REALISASI S.D 2023
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	320
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	68
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan	Nilai	90	85

Capaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi, pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan dan angkutan penyeberang telah ditetapkan dengan target 100 persen. Dari sisi infrastruktur pendukung, jumlah pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang beroperasi telah mencapai 10 lokasi dari target 11 lokasi. Sementara itu, pengoperasian terminal tipe A dan terminal barang ditetapkan sebanyak 1 lokasi, namun realisasinya belum tercapai sampai dengan tahun 2023 dikarenakan belum adanya kegiatan tersebut pada tahun 2023.

Pada sasaran meningkatnya pelayanan transportasi darat, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP telah terealisasi sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar transportasi darat, khususnya di pelabuhan penyeberangan, telah dilaksanakan sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya keselamatan transportasi darat, persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi ideal mencapai 100 persen sesuai target. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan jalan seperti ZoSS, RASS, dan batas kecepatan baru terealisasi sebanyak 10 lokasi. Pada 2023 target 2024 yaitu 25 lokasi. Selain itu, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan mencapai 320 orang dari target 1.500 orang.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan, nilai kualitas penyelenggaraan tercatat sebesar 85 dari target 90. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan transportasi darat telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja transportasi darat menunjukkan hasil yang positif pada aspek pelayanan dan keselamatan dasar, namun masih diperlukan penguatan pada aspek konektivitas antarmoda, pemenuhan infrastruktur pendukung keselamatan, serta perluasan jangkauan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat guna mendukung sistem transportasi darat yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN /		SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi				100,00%			94,00%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	-	-	-	100	100	100,00%
IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	LOKASI	-	-	-	1	1	100,00%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	100	100	100,00%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	LOKASI	10	10	100,00%	10	10	100,00%
IKK1.8	Jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan	LOKASI	-	-	-	1	0,7	70,00%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat				100,00%			100,00%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
IKK2.4	Pengadaan dan pemasangan perangkat <i>Local Port Service</i> (LPS)	LOKASI	-	-	-	2	2	100,00%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				100,00%			100,00%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	LOKASI	-	-	-	25	25	100,00%
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	ORANG	320	320	100,00%	1500	1500	100,00%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				100,00%			100,00%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	85	100,00%	85	85	100,00%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				-			-
IKK1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	100,00%	80	80	100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					100,00%			98,80%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					100,00%			97,50%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					6			11
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					0			1

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap muatan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2020-2024. Penyusunan indikator (input, output, dan outcome) belum menggambarkan relasi antar indikator. Sebaliknya, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan

target saja. Jika evaluasi hanya menggunakan persentase realisasi terhadap target saja, maka suatu keberhasilan atau kegagalan pencapaian target output dari masing-masing Balai belum dapat menggambarkan kinerja Balai yang bersangkutan. Capaian target output dipengaruhi oleh input yang digunakan, sehingga perubahan input dapat mempengaruhi kemampuan suatu Balai untuk memenuhi target output yang ditetapkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, kerangka kerja penyusunan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 tidak hanya menggunakan perbandingan target & realisasi output saja, tetapi juga menggunakan menggunakan indeks atau rasio untuk membandingkan output dengan input maupun outcome dengan output;
- b. Penyusunan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 perlu memperhatikan relasi antara output dengan outcome untuk mengetahui efektivitas output untuk menghasilkan suatu manfaat yang diharapkan (outcome) maupun relasi antara input dengan output untuk mengetahui efisiensi penggunaan input untuk menghasilkan suatu output.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau mempunyai tugas pelaksanaan dan pemberian pelayanan, serta pengawasan terhadap keselamatan transportasi darat. Kondisi Lingkungan Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat dapat diidentifikasi sebagai potensi yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau. Berkaitan dengan hal tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, potensi dan permasalahan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau dapat diuraikan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

A. Aspek Perencanaan

Perencanaan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan rencana penyelenggaraan transportasi darat di wilayah kerja BPTD. Penyusunan rencana, program, dan anggaran dilakukan secara berjenjang dan terpadu, meliputi perencanaan pengelolaan terminal tipe A, pelabuhan penyeberangan, unit penimbangan kendaraan bermotor, pengendalian keselamatan sarana dan prasarana transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta kegiatan pengawasan lalu lintas dan angkutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya tantangan dalam keterpaduan perencanaan dengan pemerintah daerah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program. Selain itu, masih diperlukan indikator kinerja yang lebih terukur untuk menilai efektivitas kinerja pengelolaan fasilitas dan layanan

transportasi darat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, didukung data yang akurat dan sistem monitoring serta evaluasi yang konsisten.

B. Aspek Hukum

Dalam pelaksanaan tugas Balai Pengelola Transportasi Darat, aspek hukum memegang peranan penting untuk memastikan setiap kegiatan operasional, pelayanan, pengawasan, dan penegakan regulasi berjalan sesuai ketentuan. Dinamika regulasi di bidang transportasi darat, sungai, danau, dan penyeberangan menuntut adanya penyesuaian yang cepat terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan dan keselamatan transportasi.

Tantangan yang dihadapi antara lain adanya perubahan dan pembaharuan regulasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan operasional di tingkat pelaksana. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta penguatan kapasitas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di lapangan.

C. Aspek Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat menjadi faktor strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, pengawasan operasional, dan peningkatan pelayanan transportasi darat. Data operasional terminal, penyeberangan, volume lalu lintas, keselamatan, serta pengendalian kendaraan perlu dikelola secara sistematis, akurat, dan terintegrasi.

Saat ini masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya integrasi sistem informasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional, serta perlunya peningkatan keamanan data dan kesiapan menghadapi risiko gangguan sistem. Penguatan kapasitas SDM pengelola data dan percepatan penerapan tata kelola teknologi informasi menjadi kebutuhan utama untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat yang berbasis digital dan transparan.

D. Aspek Kepegawaian & Organisasi

Keberhasilan penyelenggaraan tugas Balai Pengelola Transportasi Darat sangat bergantung pada kualitas dan profesionalisme SDM. Penguatan kompetensi aparatur, khususnya dalam bidang rekayasa lalu lintas, keselamatan transportasi, pengelolaan sarana prasarana, pelayanan publik, penegakan regulasi, serta manajemen operasional menjadi kebutuhan yang terus dikembangkan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi teknis spesifik, kebutuhan peningkatan kapasitas dan sertifikasi teknis, serta perlunya penataan organisasi yang lebih adaptif terhadap dinamika pelayanan transportasi darat di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Transformasi budaya kerja menuju birokrasi yang profesional, responsif, dan melayani harus terus diperkuat.

E. Aspek Umum/ Layanan Perkantoran

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat memerlukan dukungan layanan perkantoran yang memadai, mencakup penyediaan sarana prasarana kerja, layanan administrasi, pelayanan kesehatan kerja, serta pengelolaan tata persuratan dan dokumentasi.

Masih diperlukan optimalisasi pemeliharaan fasilitas, peningkatan kualitas pelayanan internal, serta penataan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Evaluasi berkala terhadap layanan perkantoran perlu terus dilakukan guna memastikan dukungan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas operasional Balai Pengelola Transportasi Darat.

F. Aspek Keuangan

Pengelolaan keuangan di Balai Pengelola Transportasi Darat dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan secara akuntabel, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara sistematis.

Tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, ketepatan waktu pelaporan, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan. Upaya perbaikan terus dilakukan agar pengelolaan keuangan mendukung pencapaian target kinerja dan turut menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian.

G. Aspek Barang Milik Negara

Balai Pengelola Transportasi Darat mengelola berbagai aset negara berupa terminal tipe A, pelabuhan penyeberangan, fasilitas penimbangan kendaraan, fasilitas pengawasan, serta aset penunjang operasional lainnya. Tata kelola BMN harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain optimalisasi pemanfaatan BMN, ketertiban penatausahaan, dokumentasi aset, serta pemeliharaan aset agar tetap dalam kondisi layak fungsi. Penguatan kapasitas pengelola BMN, dukungan teknologi informasi, serta komitmen seluruh pegawai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.

H. Aspek Kehumasan

Sebagai unit pelayanan publik, Balai Pengelola Transportasi Darat dituntut untuk melaksanakan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan informatif. Penyampaian informasi terkait layanan, keselamatan transportasi, kebijakan operasional, hingga respons terhadap dinamika masyarakat merupakan bagian penting dari peran kehumasan.

Tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan kapasitas SDM kehumasan, penguatan media komunikasi publik baik konvensional maupun digital, tata kelola informasi yang sesuai ketentuan, serta peningkatan kecepatan dan kualitas respons terhadap isu publik.

I. Aspek Kerjasama

Dalam penyelenggaraan transportasi darat, Balai Pengelola Transportasi Darat memerlukan dukungan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi pusat, operator transportasi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama diperlukan untuk mendukung pengelolaan infrastruktur, peningkatan layanan, penguatan keselamatan, dan pengembangan pembiayaan infrastruktur transportasi.

Masih diperlukan penguatan payung hukum kerja sama, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kerja sama, identifikasi peluang kerja sama strategis, serta peningkatan peran Balai Pengelola Transportasi Darat dalam kerja sama nasional maupun regional sesuai kewenangannya.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029

merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 “Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Gambar 2.1 VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang konektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong

pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dengan didasarkan pada Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029 dan penjabaran visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang telah disampaikan guna menjalankan dan mendukung hal tersebut, maka Visi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

VISI Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029
“Menjadi organisasi pengelola transportasi darat yang profesional, aman, berkeadilan, berkualitas, terjangkau, terintegrasi, dan akuntabel dalam mendukung mobilitas masyarakat”

2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029

diturunkan dari Misi Asta Cita Presiden 2025-2029 dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
- f. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat;
- h. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2 Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025 – 2029 adalah

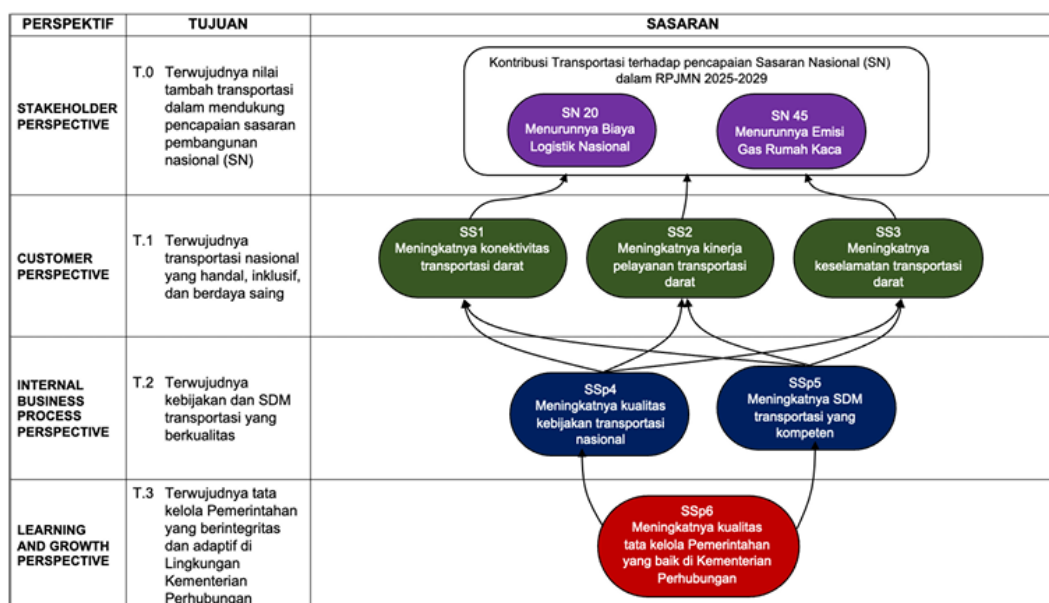
1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat;
2. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;

3. Mendorong penguatan ekosistem dan tata kelola penyelenggaraan transportasi darat yang transparan dan akuntabel;
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut, maka struktur peta strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau disampaikan pada **Gambar 2.2** sebagai berikut.



Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 Sumber: Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029

- a. *Stakeholders Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pemangku kepentingan pada bidang perhubungan darat berupa manfaat atau dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan mendukung Visi Indonesia 2045;
- b. *Customer Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pengguna layanan transportasi darat berupa hasil atau outcome dari penyelenggaraan transportasi darat sesuai lingkup tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, yaitu: konektivitas dan layanan transportasi darat yang berkualitas dan berkeselamatan;
- c. *Internal Business Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan di bidang perhubungan darat yang diwujudkan melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur transportasi (sarana, dan prasarana) maupun pengembangan SDM sektor transportasi darat yang berkualitas; dan

- d. *Learning and Growth* Perspectives menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Perhubungan Darat dalam penyediaan input/masukan bagi jalannya organisasi berupa penyediaan SDM internal, pendanaan, pengelolaan data dan informasi, perlengkapan kerja, regulasi, organisasi dan tata kerja yang dikelola sesuai prinsip good governance.

2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi darat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029
2. Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2.3.2 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tujuan Balai PeneBalai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau diturunkan dari tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat yang aman;
2. Peningkatan kualitas layanan transportasi darat yang berdaya saing;
3. Optimalisasi tata kelola dan ekosistem transportasi yang akuntabel;
4. Terpenuhnya kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat.

2.3.3 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2025-2029). Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Sasaran Program (SP) yang ditetapkan pada level kementerian. Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Darat selama periode 2025-2029 adalah:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	IKP1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Jalan	IKK1.1.2 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	6	6	6	9	9	9	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 1.1.3B Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan	1	1	1	1	1	1	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 1.1.3A Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	0	1	1	1	1	1	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 1.1.5 Jumlah Pembangunan terminal barang untuk mendukung konektivitas	0	0	0	1	2	1	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	IKP 1.2 Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	IKK 1.2.2 Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	0	0	0	2	3	1	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 1.2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	5	4	4	5	5	5	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
SP 2 Meningkatnya	IKP 2.1 Indeks Kepuasan	IKK 2.1.5 Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang yang	-	0	0	1	1	1	Seksi Prasarana Jalan, Sungai,

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB
Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Jalan	ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM							Danau, dan Penyeberangan
		IKK 2.1.9 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	-	5	5	5	5	5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK 2.1.10 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	0	0	0	1	1	1	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
	IKP 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi ASDP	IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	11	12	5	6	6	6	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 2.6.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	2	3	2	4	2	2	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK 2.2.4 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	0	3	3	6	7	5	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
SP 3 Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKP 3 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	0	0	0	2	1	0	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	2	2	2	2	2	2	Seksi Sarana Angkutan Jalan,

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB
									Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	1	0	0	1	0	0	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 3.3.1 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	-	15	1	2	3	2	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK 3.3.3 Jumlah Lokasi yang Mendapatkan Intervensi Penanganan Manajemen Kecepatan Sesuai Pedoman	15	0	0	8	0	0	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK 3.4.1 Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	1	1	1	1	1	1	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK 3.4.2 Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	1	1	1	1	1	1	Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB
SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Provinsi Kepulauan Riau	-	3	4	3	3	4	Seksi Tata Usaha
		IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	-	82,5	82,6	82,7	82,8	83	Seksi Tata Usaha
		IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	68%	70%	72%	73%	74%	Seksi Tata Usaha
		IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	-	60%	60%	60%	60%	60%	Seksi Tata Usaha
		IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	-	80	80,5	81	81,5	82	Seksi Tata Usaha
		IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	10	20	13	9	Seksi Tata Usaha
		IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	-	8	9	9	9	9	Seksi Tata Usaha

Tabel 2.2 Manual Perhitungan Indikator Kegiatan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PENGERTIAN	CARA MENGHITUNG
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	IKP1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Jalan	IKK1.1.2 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang adalah Jumlah layanan angkutan jalan penumpang yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran
		IKK 1.1.3B Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan	Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek Layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan yang anggaran berada pada BPTD/UPT
		IKK 1.1.3A Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang pada wilayah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis lainnya yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang pada wilayah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis lainnya yang anggaran berada pada BPTD/UPT
		IKK 1.1.5 Jumlah Pembangunan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Jumlah terminal barang yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri	Jumlah terminal yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT. a. Nilai 1 : selesai dibangun dan beroperasi (100%) b. Nilai 0,5 : belum beroperasi dan mengikuti nilai realisasi fisik (Cth : 50%) c. Nilai lainnya mengikuti fisik pekerjaan
		IKK 1.2.2 Jumlah Pembangunan Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri	Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PENGERTIAN	CARA MENGHITUNG
	IKP 1.2 Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	ASDP untuk mendukung konektivitas		Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT. a. Nilai 1 : selesai dibangun dan beroperasi (100%) b. Nilai 0,5 : belum beroperasi dan mengikuti nilai realisasi fisik (Cth : 50%) c. Nilai lainnya mengikuti fisik pekerjaan
		IKK 1.2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP adalah Jumlah layanan angkutan ASDP yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek layanan subsidi transportasi ASDP dalam satu tahun anggaran.
SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Jalan	IKK 2.1.5 Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang pada Jalan Nasional yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan. Jumlah fasilitas perpindahan penumpang untuk pemenuhan SPM adalah jumlah terbangunnya fasilitas pendukung perpindahan penumpang yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang pada Jalan Nasional yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan. yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
		IKK 2.1.9 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LLAJ, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
		IKK 2.1.10 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi dokumen	Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PENGERTIAN	CARA MENGHITUNG
	IKP 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi ASDP		perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLAJ.	yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
		IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
		IKK 2.6.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran pelayanan penyeberangan melalui fungsi pengawasan terhadap sarana dan prasarana terminal penumpang. Kegiatan ini meliputi operasionalisasi sistem pengawasan, pemeriksaan kelayakan fasilitas, pemeliharaan perangkat pendukung pengawasan, serta tindak lanjut terhadap temuan guna menjamin penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas II Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.
		IKK 2.4.4 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASDP, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
SP 3 Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKP 3 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKK 3.2.1 Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PENGERTIAN	CARA MENGHITUNG
		IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
		IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi adalah Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan oleh BPTD guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kalibrasi alat uji UPUPKB Pemda di wilayah kerja	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan oleh BPTD guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kalibrasi alat uji UPUPKB Pemda di wilayah kerja yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
		IKK 3.3.1 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda	Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda pada ruas Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis) yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
		IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah diintervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll.	Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah diintervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll. yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
		IKK 3.3.3 Jumlah Lokasi yang Mendapatkan Intervensi Penanganan Manajemen Kecepatan Sesuai Pedoman	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman adalah jumlah lokasi yang dilakukan pengaturan, pengendalian, serta penertiban kecepatan kendaraan berdasarkan ketentuan teknis dan pedoman manajemen kecepatan yang berlaku. Intervensi penanganan dapat berupa penerapan batas kecepatan, pemasangan fasilitas pengendali kecepatan, penataan rekayasa lalu lintas, pemasangan rambu dan alat pengendali lalu lintas, serta tindakan pengawasan lainnya guna meningkatkan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman dalam satu tahun anggaran yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PENGERTIAN	CARA MENGHITUNG
			keselamatan dan menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas.	
		IKK 3.4.1 Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Serangkaian upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan menggunakan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkeselamatan.	Kampanye keselamatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dari pengguna jalan . Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan target peserta kampanye yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
		IKK 3.4.2 Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Program edukasi keselamatan yang bertujuan menanamkan kesadaran dan perilaku tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak .	SALUD merupakan upaya pembentukan safety culture sejak dini dengan sasaran anak usia PAUD–SD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Kepulauan Riau	kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Propinsi Kepulauan Riau.	Kegiatan terkait perencanaan jangka pendek , menengah dan panjang transportasi darat di Propinsi Kepulauan Riau
		IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).	Kegiatan terkait PK, SAKIP, LAKIP, MR, SPIP dan LMCK pada BPTD yang dibiayain dengan Anggaran BPTD/UPT.
		IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan.	Kegiatan terkait Daya serap dan realisasi keuangan
		IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK karena menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.	Prosentase dihitung dari jumlah Rekomendasi BPK yang telah di tindaklanjuti (Status Proses) dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima.
		IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan	Jumlah Kegiatan terkait ZI, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam 1 tahun.

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PENGERTIAN	CARA MENGHITUNG
			Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan.	
		IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah serangkaian proses dan sistem yang dirancang untuk menjamin agar setiap tahap pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan efektif, efisien, transparan, adil, bersaing, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berkualitas, tepat waktu, dan berintegritas, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.	Jumlah Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Terealisasi diukur dalam satuan kegiatan/pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal & pedoman pengadaan.
		IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Kegiatan untuk menindak lanjuti jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun.

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Arah Kebijakan menurut Permen PPN/Kepala Bappenas No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Hasil identifikasi diperoleh 9 (sembilan) isu strategis pada bidang perhubungan darat sebagai berikut:

1. Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik;
2. Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan;
3. Konektivitas wilayah daratan;
4. Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK;
5. Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan;
6. Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil;
8. Penanganan kendaraan barang ODOL; dan
9. Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.

Arah kebijakan untuk menjawab isu strategis bidang perhubungan darat dan arahan Prioritas Nasional dan indikasi kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Astacita pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tabel 3.1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Penguatan Infrastruktur Konektivitas & Sarana Penunjang Logistik b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita: - Pendukung Asta Cita 3: Pembangunan Terminal Barang Moda Jalan; - Pendukung Asta Cita 5: Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional dan Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang
Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 6: Buy The Service (BTS) BRT Perkotaan	Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
Konektivitas wilayah daratan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) - Pendukung Asta Cita 3: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan	Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan Terminal Barang Internasional di wilayah perbatasan - Pendukung Asta Cita 6: Penyelenggaraan angkutan keperintisan moda jalan dan PSO angkutan barang.	Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Pembangunan/rehab/pengembangan pelabuhan TSDP (termasuk pelabuhan Ro-Ro), Pembangunan Halte Sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan; dan Pengembangan dan penetapan lintas komersil maupun perintis penyeberangan di kawasan timur	Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
	- Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan/revitalisasi/peningkatan pelabuhan SDP pada kawasan prioritas	
Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan nasional dan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil	a. Kegiatan prioritas pada Asta Cita/Prioritas Nasional 2: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 2: Insentif elektifikasi kendaraan bermotor umum, Pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan, Pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, Implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, dan Pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Penanganan kendaraan barang ODOL	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang)	Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus
Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan	Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang;
2. AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
3. AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
4. AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
5. AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau
6. AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
7. AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
8. AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus
9. AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja
10. AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi
11. AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul
12. AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
13. AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

Penyelarasan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 untuk menjawab Sasaran Program yang diturunkan dari balanced scorecard disajikan pada Tabel 3.2. Dengan memperhatikan kesamaan lokus, Sasaran program meningkatnya konektivitas transportasi darat (SP.1) dan kinerja pelayanan transportasi darat (SP.2) digabungkan untuk dijawab oleh satu arah kebijakan pada masing-masing lokus bidang perhubungan darat. Masing-masing arah kebijakan di atas diuraikan menjadi Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat	AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang	Meningkatkan konektivitas antara gateway (pelabuhan & bandar udara), kawasan industri, dan pusat logistik/terminal barang sebagai pusat konsolidasi/ distribusi
		Meningkatkan kelancaraan arus barang untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama pulau
SP.2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan	Meningkatkan coverage area angkutan perkotaan dengan integrasi jaringan angkutan umum massal perkotaan yang door-to-door dan seamless
		Meningkatkan panjang perjalanan angkutan umum perkotaan sebagai moda prioritas
		Menurunkan panjang perjalanan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan
	AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan	Meningkatkan konektivitas antar terminal penumpang Tipe A pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan pada KEK, KSN, dan KI
		Meningkatkan jumlah penumpang angkutan antar kota dan antar moda
		Meningkatkan kelancaraan lalu lintas pada koridor utama pulau
	AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	Meningkatkan aksesibilitas Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)
		Menurunkan biaya angkutan barang berbasis jalan dari/ke pelabuhan menuju hinterland di wilayah DTPK
	AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau	Meningkatkan kapasitas lintas angkutan penyeberangan komersial dan perintis

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Meningkatkan jumlah kendaraan yang diangkut dengan angkutan penyeberangan komersial
		Menurunkan paparan risiko perjalanan lalu lintas jalan
		Menurunkan jumlah konflik lalu lintas jalan
		Meningkatkan kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan
		Meningkatkan pemenuhan active & passive safety pada kendaraan yang turun ke jalan
		Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan
		Meningkatkan tata kelola pelaksanaan rencana aksi keselamatandan kemitraan keselamatan lalu lintas jalan
	AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan	Menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor
		Menurunkan emisi gas rumah kaca LLAJ
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
SP.4 Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi darat	AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus	Meningkatkan kepatuhan dimensi dan muatan pada angkutan barang khusus (tidak berbahaya dan berbahaya) dengan didukung pengawasan operasional secara digital
	AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan kehandalan sistem informasi LLAJ untuk menyediakan Actual Data bagi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja
	AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi	Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SPp5 Meningkatnya SDM transportasi darat yang kompeten	AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul
SPp6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
	AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat	Meningkatkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat yaitu membangun tata kelola penyelenggaraan transportasi darat yang berintegritas dan adaptif memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang transportasi darat serta keberhasilan pembangunan sektor perhubungan darat. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat selama tahun 2025-2029, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Layanan Angkutan Jalan dan Antarmoda
Kebijakan difokuskan pada penguatan konektivitas melalui penyediaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dan Angkutan Barang yang tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi Layanan Angkutan Antarmoda di Wilayah KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) terus ditingkatkan untuk mendukung sektor pariwisata. Hal ini didukung dengan penyusunan Dokumen Teknis Tusi LLAJ serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi layanan secara berkala guna memastikan standar pelayanan minimal (SPM) terpenuhi. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen SAKIP. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang berbasis outcome, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja. Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat berkomitmen mendorong peningkatan nilai SAKIP secara konsisten sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi.
2. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Penyeberangan (ASDP).
Mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Barang serta Pelabuhan Penyeberangan untuk memperkuat simpul logistik nasional. Kebijakan ini mencakup pemberian Subsidi Transportasi Angkutan ASDP, pemenuhan Fasilitas Perpindahan Penumpang sesuai SPM, serta pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP (Ex LPS) di pelabuhan. Pengawasan ketat dilakukan melalui monitoring evaluasi fungsi ASDP untuk menjamin kepastian jadwal dan keselamatan pengguna jasa. Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, tertib administrasi, patuh regulasi, dan produktif. Penguatan sistem pencatatan, pemanfaatan, serta pengawasan aset menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan Indeks Pengelolaan Aset secara berkelanjutan.
3. Penguatan Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi
Meningkatkan aspek keselamatan kendaraan melalui Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun yang ketat sesuai pedoman. Kebijakan ini juga mencakup standarisasi alat pengujian melalui Kalibrasi Alat Uji di UPUBKB serta pengadaan kegiatan pendukungnya. Di sisi prasarana, fokus diarahkan pada pemasangan Perlengkapan Jalan sesuai spesifikasi teknis untuk meminimalisir risiko kecelakaan di jalan nasional.
4. Manajemen Keselamatan dan Intervensi Kerawanan Jalan
Menedepankan pendekatan preventif melalui intervensi pada Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) dan penerapan Manajemen Kecepatan sesuai pedoman teknis. Budaya keselamatan dibangun secara berkelanjutan melalui pelaksanaan Pekan

Keselamatan Jalan dan program Pengajaran Keselamatan LLAJ bagi Anak Usia Dini, guru, maupun pendamping di berbagai lokasi strategis untuk menciptakan generasi sadar keselamatan.

5. Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Akuntabilitas

Meningkatkan kualitas internal melalui pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ditjen Hubdat yang terintegrasi. Kebijakan ini menekankan pada:

- Peningkatan Nilai SAKIP BPTD sebagai wujud akuntabilitas kinerja.
- Optimalisasi Realisasi Anggaran Direktorat Teknis secara efisien dan transparan.
- Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK untuk mencapai opini laporan keuangan yang berkualitas.
- Pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui pencapaian Nilai LKE yang optimal.
- Penguatan Sistem Merit SDM dan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang kredibel dan akuntabel.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
SP 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	Peningkatan Layanan Angkutan Jalan dan Antarmoda	• Penyediaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dan Angkutan Barang secara berkelanjutan. • Penyediaan Layanan Angkutan Antarmoda di Wilayah KSPN untuk mendukung sektor pariwisata nasional. • Penyusunan Dokumen Teknis terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tusi) LLAJ sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. • Peningkatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelayanan Tusi LLAJ guna menjaga kualitas layanan publik.
SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	Pengembangan Infrastruktur Layanan Penyeberangan (ASDP)	• Pembangunan dan pengoperasian Terminal Barang serta Pelabuhan Penyeberangan untuk mendukung konektivitas logistik. • Penyediaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP bagi wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). • Penyediaan Fasilitas Perpindahan Penumpang dan Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). • Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP (Ex LPS) serta Monitoring Evaluasi berkala pada fungsi ASDP.
SP 3 Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penguatan Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi	• Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. • Peningkatan kualitas pengujian melalui Kalibrasi Alat Uji di UPUBKB dan pengadaan kegiatan pendukung kalibrasi. • Pemasangan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis..
SP 3 Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Manajemen Keselamatan dan Intervensi Kerawanan Jalan	• Intervensi penanganan pada Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) sesuai pedoman. • Intervensi penanganan Manajemen Kecepatan di lokasi yang telah ditetapkan. • Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan secara berkala.

		• Pengajaran Keselamatan LLAJ bagi Anak Usia Dini oleh guru atau pendamping pada lokasi yang berbeda.
SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	Pengiatan Tata Kelola Organisasi dan Akuntabilitas.	• Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat secara kumulatif. • Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) BPTD dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Realisasi) Direktorat Teknis. • Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan. • Peningkatan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM melalui penilaian LKE. • Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa serta penerapan Sistem Merit SDM secara transparan dan objektif.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) disusun untuk ikut mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance* dalam lingkup tugas dan fungsi BPTD.

Tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat memiliki tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, jembatan timbang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta pelaksanaan fungsi keselamatan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta struktur organisasi BPTD, kebutuhan penguatan kerangka regulasi adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana transportasi darat, serta hukum dan kerjasama yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP dan PM terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut.

Melalui kerangka regulasi yang diajukan dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan integritas kelembagaan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.4 Daftar kebutuhan penguatan regulasi pada periode 2025-2029

NO.	KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan	Perlu adanya perubahan dan penyempurnaan berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi jalan	2026 - 2029
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, standar global, regulasi dan peningkatan keselamatan	2025 - 2026

NO.	KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	TARGET PENYELESAIAN
3	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan prakiraan dan perencanaan perpindahan orang dan/atau barang pada lingkup nasional, perencanaan lokasi dan kebutuhan simpul nasional, dan rencana kebutuhan ruang lalu lintas nasional	2025 - 2026
4	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Perlu adanya penyesuaian terkait dengan jenjang kompetensi penguji berkala agar sinkron dengan jabatan fungsional penguji	2025 – 2026
5	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Perlu adanya penyesuaian terkait dengan perkembangan pengujian tipe kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan regulasi internasional (UNR)	2025 - 2026
6	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemberian kemudahan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan penyesuaian terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang HKPD	2025 - 2026
7	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek	2025 - 2026
8	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan	Perlu adanya penyesuaian terhadap klasifikasi dan jenis angkutan barang dan perizinan angkutan barang	2025 - 2026
9	Permenhub No. PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan	Penguatan Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi (JTOJembatan Timbang Online & WIM – Weight In Motion Dengan E-TLE – Electronic Traffic Law Enforcement) untuk pengawasan, penegakan dan penindakan hukum.	2026 - 2027
10	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	- Masa Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sampai dengan 31 Desember 2026; - Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan yang dinormalisasi 0 (nol) rupiah; - Tahun kendaraan bermotor yang dapat mengikuti program normalisasi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang diregistrasi dan diidentifikasi (regident) sebelum Juli 2025.	2025 - 2026
11	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI dan JBKI untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik, berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan	- Besaran MST tiap sumbu atau gabungan sumbu roda ditetapkan berdasarkan jenis sumbu roda, fungsi sumbu roda, ciri bentuk sumbu roda atau gabungan sumbu roda yang digunakan, jarak sumbu roda, kekuatan ban, jenis suspensi yang digunakan serta kelas jalan yang dilalui. - Pedoman Perhitungan JBI/JBKI ini salah satunya dimaksudkan agar penetapan JBI dan JBKI pada dokumen SRUT dan BLU-E memiliki keseragaman (dinas perhubungan (UPUBKB) kab./kota dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak perlu melakukan perhitungan ulang JBI/JBKI). (tekankan pada penguji di masing-masing daerah)	2025 - 2026
12	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang	Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan perizinan angkutan orang dalam trayek	2025 - 2026

NO.	KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	TARGET PENYELESAIAN
13	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Subsidi Angkutan Perkotaan (Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan)	Penyesuaian terhadap skema pemberian subsidi yang merupakan bagian dari bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2025 - 2026
14	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	Berdasarkan hasil kajian teknis, terkait dengan kriteria wajib andalalin sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan mekanisme penerbitan persetujuan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.	2025 - 2026
15	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum)	Merupakan amanat dari Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2025 - 2026
16	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Marka Jalan	Penambahan jenis dan teknologi untuk meningkatkan visibilitas marka jalan dan sensor sesuai dengan perkembangan kebutuhan	2025 - 2026
17	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas	Penambahan jenis dan teknologi Rambu Lalu Lintas sesuai dengan perkembangan kebutuhan	2025 - 2026
18	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana diubah dengan PM 35 Tahun 2019)	Berdasarkan hasil kajian teknis, terkait dengan kriteria wajib andalalin sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan mekanisme penerbitan persetujuan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.	2025 - 2026

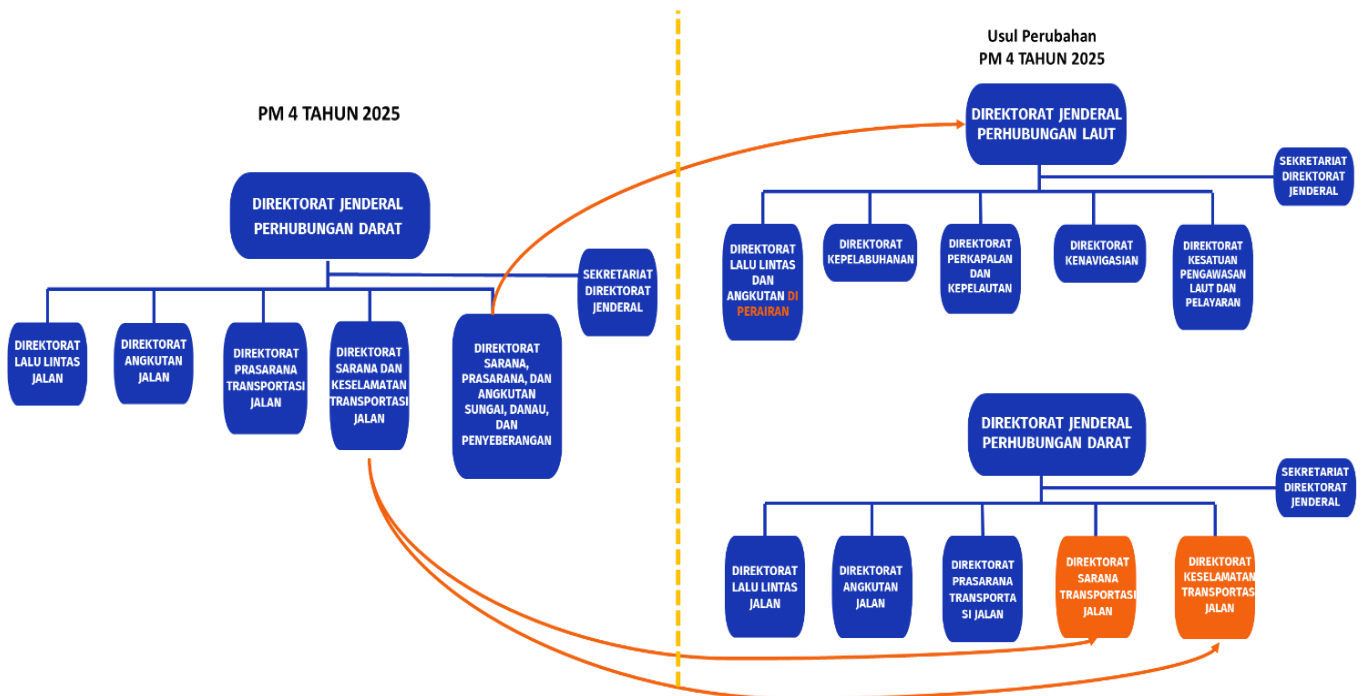
3.4 Kerangka Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024

Penataan kelembagaan merupakan salah satu kunci dalam reformasi birokrasi di mana proses transisi dapat dilaksanakan melalui reorganisasi yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi penataan kelembagaan meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi serta merampingkan birokrasi agar efektif dan efisien. Di samping hal tersebut, juga ditempuh strategi *delivery system* (mencakup tata laksana dan pola organisasi) yang tepat berupa sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *good governance*. Berikut adalah Substansi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :

Pada awal tahun 2025 terdapat beberapa substansi penataan organisasi melalui usulan perubahan Perpres 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Pengalihan Tusi Penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut,

serta penguatan fungsi pengawasan keselamatan jalan di tingkat wilayah. Berikut adalah Substansi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD):

1. Penyesuaian Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - Penyesuaian koordinasi teknis terkait pengalihan tugas SDP dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut di tingkat pelabuhan penyeberangan.
 - Clustering tugas, penajaman dan perubahan nomenklatur jabatan pada unit kerja penyeberangan di lingkup BPTD.
 - Penataan administrasi dan integrasi pelayanan angkutan penyeberangan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.
2. Penguatan Fungsi Keselamatan dan Pengawasan Transportasi Jalan
 - Penguatan fungsi BPTD dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaikan sarana dan prasarana transportasi jalan.
 - Optimalisasi peran unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) di wilayah kerja melalui pengawasan teknis yang lebih ketat.
 - Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi dari level pimpinan hingga staf untuk mendukung program keselamatan jalan nasional.



Gambar 3.1
Penataan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Program Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Program

Target kinerja Program Dukungan Manajemen diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari setiap Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana disampaikan pada subbab 2.3.2. Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama periode 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Program Ditjen Perhubungan Darat

SASARAN PROGRAM (SP)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/SASARAN KEGIATAN (SK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
SP 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat							
IKP 1.1 Rasio konektivitas transportasi Jalan	Rasio	0,426	0,444	0,459	0,499	0,508	0,606
IKP 1.2 Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	Rasio	0,565	0,570	0,572	0,572	0,572	0,573
SP 2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi Darat							
IKP2.1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi Jalan	Indeks	96,47	96,47	96,55	96,70	96,90	97,00
IKP2.2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	Indeks	96,47	96,47	96,55	96,70	96,90	97,00
SP 3 Meningkatkan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan							
IKP 3 Peningkatan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	91,70	91,70	92,58	94,11	95,32	96,28
SP 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan							
IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	90,84	90,84	91	91,1	91,2	91,3

Target pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dirumuskan sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil. Pencapaian target tersebut diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SKK), sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis periode 2025–2029.

Secara bertahap, target kinerja menunjukkan tren peningkatan pada semua aspek. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi fokus utama, yang tercermin dari target Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, serta optimalisasi layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Sementara itu, penguatan kelembagaan didukung melalui penerapan sistem merit SDM, penyederhanaan birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas. Secara keseluruhan, target kinerja Dukungan Manajemen diarahkan untuk memastikan bahwa fungsi administratif, kelembagaan, dan pelayanan internal mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara berkelanjutan dan berdaya guna.

4.1.2 Target Keluaran (Output) Pelaksanaan Kegiatan

Tabel Output Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025–2029 menggambarkan komitmen penguatan konektivitas transportasi darat melalui pelayan publik serta penguatan tata kelola internal melalui perencanaan, penganggaran, SDM, keuangan, hukum, teknologi informasi, dan pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan. Pada Tabel 4.2 disampaikan target keluaran (output) atau proyek prioritas dari pelaksanaan program di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau. Secara umum target keluaran yang ditargetkan dari setiap kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pada sub sektor transportasi darat selama periode 2025-2029.

Tabel 4.2 Target Keluaran (Output) RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	IKK 1.1.2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan Jalan	1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sembulang - Jodoh (Batam)	Trayek	1	1	1	1	1
		2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ranai - Cemaga - Selat Lampa (Natuna)	Trayek	1	1	1	1	1
		3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Kudung (Kab Lingga)	Trayek	1	1	1	1	1
		4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ranai - Batubi - Kelarik (Kab. Natuna)	Trayek	1	1	1	1	1
		5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Penarik (Kab. lingga)	Trayek	1	-	-	-	-
		6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Dabo - Jagoh (Kab. Lingga)	Trayek	1	-	-	-	-
		7. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Tanjung Awak (Kab. Lingga)	Trayek	-	1	1	1	1
		8. Layanan Subsidi Perintis Trayek Dabo - Kuala Raya (Kab.Lingga)	Trayek	-	1	1	1	1
		9. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik - Penarik (Kab. Lingga)	Trayek	-	-	-	-	-
		10. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ranai- Kp. Tebing Tinggi (Kab. Natuna)	Trayek	-	-	1	1	1
		11. Layanan Subsidi Perintis Trayek Tugu Mtq - Pongkar (Kab. Karimun)	Trayek	-	-	1	1	1
		12. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Pansur (Kab. Lingga)	Trayek	-	-	1	1	1
		13. Layanan Subsidi Perintis Trayek Coastal Area-Bandara Raja Haji Abdullah-Stadion GOR Badang Pperkasa-Teluk Paku-Pasir Panjang (Kab.Karimun)		-	-	1	1	1
2	IKK 1.1.3B Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan	1. Layanan Subsidi Barang Trayek Pel. Lampa - Ranai	Trayek	1	1	1	1	1
		2. Pelabuhan Letung - Letung	Trayek			1	1	1

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
3	IKK 1.1.3A Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Strategis dan atau pedesaan antar provinsi	1. Layanan Angkutan KSPN Trayek Sei Carang - Ruas Sahera (Kab. Bintan)	Trayek	1	-	-	-	-
		2. Layanan Angkutan KSPN Trayek Tugu Sirih (Pelabuhan Sri Bintan Pura) - Patung Seribu - Terminal Sei Carang - Pulau Pucung (Pantai Trikora) - Simpang Lagoi - Kawasan Lagoi (PP)	Trayek	-	1	1	-	-
		3. Layanan Angkutan KSPN Trayek Tugu Sirih (Pelabuhan Sri Bintan Pura) - Kawasan Lagoi	Trayek	-	-	-	1	1
		4. Layanan Angkutan KSPN Trayek pelabuhan tanjung uban - lagoi	Trayek	1	-	-	-	-
4	IKK 1.1.5 Jumlah Pembangunan terminal barang untuk mendukung konektivitas	1. Pembangunan Terminal Barang di Kepulauan Riau	Unit	-	-	-	1	1
		2. Pembangunan UPPKB di Bintan	Unit	-	-	1	1	-
		3. Pembangunan terminal tipe A di kepulauan riau	Unit	-	-	1	1	-
5	IKK 1.2.2 Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Tarempa	Unit	-	-	1	1	-
		2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Serasan	Unit	-	-	-	1	1
		3. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Midai	Unit	-	-	1	1	-
6	IKK 1.2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	1. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Dabo - Penarik	Lintasan	1	1	1	1	1
		2. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Tanjung Pinang - Dabo, Tanjung Pinang - Karimun	Lintasan	1	1	1	1	1
		3. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Tanjung Uban - Matak, Matak - Midai, Midai - Natuna, Natuna - Subi, Subi - Serasan, Serasan - Sintete	Lintasan	1	1	1	1	1
		4. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Tanjung Uban - Tambelan, Tambelan - Sintete	Lintasan	1	1	1	1	1
7	IKK 2.1.5 Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Pembangunan Fasilitas Pendukung Perpindahan Penumpang (Bantuan Teknis)	Paket					
		Pembangunan Fasilitas Pendukung Perpindahan Penumpang (Halte dan Trotowar) di Batam	Paket	-	-	1	1	1
8	IKK 2.1.9 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja	Kegiatan	2	3	3	3	3
		2. Pengelolaan urusan keuangan dan PNBP serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi	Kegiatan	0	1	1	1	1
		3. Pengelolaan Bidang Hukum Humas dan Umum	Kegiatan	7	7	7	7	7
		4. Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan	Kegiatan	8	8	8	8	8
		5. Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala	Kegiatan	14	14	14	14	14
		1. pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		2. Pengendalian operasional lalu lintas jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		3. penyusunan dokumen andalalin	Kegiatan		1	1	1	1
		4. Pemantauan Operasional Lalu Lintas Jalan	Kegiatan		1	1	1	1

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		5. Survey kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		6. Monitoring pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		7. Monitoring operasional dan perawatan teknologi rekayasa lalu lintas jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		8. Survey kebutuhan perlengkapan jalan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan		1	1	1	1
		9. Survey lokasi daerah rawan kecelakaan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan		1	1	1	1
		10. Survey bantuan teknis perlengkapan jalan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan		1	1	1	1
		11. Survey kinerja lalu lintas jalan nasional di wilayah kepulauan riau	Kegiatan		1	1	1	1
		12. Monitoring dan pemantauan lalu lintas jalan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan		1	1	1	1
		13. Monitoring dan pemantauan penyelenggaraan posko angkutan lebaran, natal, dan tahun baru di wilayah kepulauan riau	Kegiatan		1	1	1	1
		15. Pengamatan dan pemantauan pemenuhan perlengkapan jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		16. Pengamatan dan pemantauan pemanfaatan bantuan teknis	Kegiatan		1	1	1	1
		17. Pengamatan dan pemantauan kendaraan bermotor di jalan	Kegiatan		1	1	1	1
		18. Monitoring dan evaluasi andalalin	Kegiatan		1	1	1	1
9	IKK 2.1.10 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	19. Survey pendahuluan dan kajian analisis dampak lalu lintas	Kegiatan		1	1	1	1
		1. Kajian DED Kebutuhan dan existing perlengkapan jalan	Dokumen		1	1	1	1
		2. Penyusunan dokumen PBG-SLF terminal tipe A kepulauan riau	Dokumen			1	1	
10	IKK 2.2.1 Jumlah Pelabuhan ASDP yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	3. DED taman edukasi	Dokumen			1	1	
		1. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dabo	Unit	-	-	1	-	-
		2. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dompok	Unit	-	-	-	-	1
11	IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	3. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sedanau	Unit	-	-	-	1	-
		1. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	Unit	1	1	1	1	1
		2. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban	Unit	1	1	1	1	1
		3. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Balai Karimun	Unit	1	-	-	-	-
		4. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia	Unit	1	-	-	-	-
		5. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Dompok	Unit	1	-	-	-	-
		6. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Dabo	Unit	1	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		7. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Penarik	Unit	1	-	1	1	1
		8. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tambelan	Unit	1	1	1	1	1
		9. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Matak	Unit	1	-	-	-	-
		10. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Penagi	Unit	1	-	-	-	-
		11. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Letung	Unit	1	1	1	1	1
		12. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau	Unit	1	1	1	1	1
		13. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa	Unit	-	-	-	-	-
12	IKK 2.2.6 Peningkatan Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	1. Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban	Unit	1	1	1	1	1
		2. Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	Unit	1	1	1	1	1
		3. Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB dan VHF di Pelabuhan Penyeberangan Letung, Penagi, Midai, Subi, Sedanau, Dabo, Dompok (Termasuk Supervisi)	Unit	-	-	1	-	-
		4. Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB dan VHF di Pelabuhan Penyeberangan Matak, Tanjung Balai Karimun dan Tambelan (Termasuk Supervisi)	Unit	1	-	-	-	-
		5. Pemeliharaan Radio SSB dan VHF di Pelabuhan Penyeberangan Matak, Tanjung Balai Karimun, Tambelan	Unit	-	-	1	-	-
13	IKK 2.2.4 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	1. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Dabo	Kegiatan	-	-	1	-	-
		2. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Dompok	Kegiatan	-	-	-	-	1
		3. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Sedanau	Kegiatan	-	-	-	1	-
		4. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Tarempa	Kegiatan	-	-	1	1	-
		5. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Serasan	Kegiatan	-	-	-	1	1
		6. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Midai	Kegiatan	-	-	1	1	-
		7. Monitoring trayek layanan angkutan penyeberangan perintis	Kegiatan	1	1	1	1	1
		8. Monitoring dan Pemantauan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Kegiatan	1	1	1	1	1
		9. Penegakkan hukum bidang SDP	Kegiatan	1	1	1	1	1
		10. Pemeriksaan kelaiklautan kapal SDP	Kegiatan					
		11. Monitoring operasional kapal SDP	Kegiatan					
		12. Pemeriksaan SPM kapal penyeberangan	Kegiatan					
		13. Penetapan jadwal operasional ASDP	Kegiatan					

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		14. Survey SPM di pelabuhan penyeberangan	Kegiatan					
		15. Survey kebutuhan penyediaan rambu sungai dan danau	Kegiatan					
14	IKK 3.2.1 Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Pemenuhan Alat Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun (timbangan portable) Sarana Angkutan Jalan di Kepulauan Riau	Paket	-	-	1	1	-
		Pembangunan Taman Sadar Lalu Lintas (Taman Edukasi)	Paket	-	-	1	1	-
15	IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kepulauan Riau	Kegiatan	1	1	1	1	1
		2. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Non Statis Kendaraan Bermotor Non Statis	Kegiatan	1	1	1	1	1
16	IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	1. Pengadaan Alat Kalibrasi di Kepulauan Riau	Paket	-	-	1	-	-
17	IKK 3.3.1 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan (Bantuan Teknis)						
		a. LPJU	Unit	57	41	62	55	66
		b. Marka Jalan	M'	12130	17872	15300	14500	16100
		c. Delinator	Unit	420	373	300	345	350
		d. Guard rail	M'			200	245	350
		e. Rambu Lalu Lintas	Unit	437		200	152	175
		f. warning Light	Unit	7		5	7	9
		g. Tiang F / RPPJ	Unit	27		12	15	18
		h. Paku Jalan	Unit	804		1000	1200	1300
		2. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan (Bantuan Teknis)						
		a. LPJU	Unit		8			
18	IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. Sp. Gesek (Km 16) Sp. Busung (Simpang Gereja St. Matias) , B. Jln. Wr Supratman (Sp. Rsup - Sp. Tugu Kebulatan, C. Sp. Busung - Sp. Lobam, D. Sp. Lobam - Tanjung Uban E. Jl. Basuki Rahmat F. Jl. A.Yani G. Sp. Parit Rampak - Sp. Parit Benut	Lokasi	4				
		a. LPJU	Unit	44	-	-	-	-
		b. Marka Jalan	M'	5700	-	-	-	-
		c. Delinator	Unit	310	-	-	-	-
		d. Guard rail	M'	1030	-	-	-	-
		e. Rambu Lalu Lintas	Unit	105	-	-	-	-
		f. Warning light	Unit	34	-	-	-	-
		g. Paku Jalan	Unit	1417	-	-	-	-
		h. rumblr strip	Unit	-	-	-	-	-
		2. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. 013.11.K Tanjung Balai - Sp. Meral	Lokasi		1			
		A. Lpju	Unit	-	-	-	-	-
		B. Marka Jalan	M'	-	200	-	-	-
		C. Delinator	Unit	-	-	-	-	-
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	6	-	-	-

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		F. Warning Light	Unit	-	2	-	-	-
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	-	-
		H. Rumlir Strip	Unit	-	4	-	-	-
		3. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. 030 11 K Ranai - Sp. Tanjung, B. Sp. Kangka - Sp. Sialang	Lokasi			2		
		A. Lpju	Unit	-	-	8	-	-
		B. Marka Jalan	M'	-	-	1700	-	-
		C. Delinator	Unit	-	-	-	-	-
		D. Guard Rail	M'	-	-	200	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	16	-	-
		F. Warning Light	Unit	-	-	12	-	-
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	130	-	-
		H. Rumlir Strip	Unit	-	-	12	-	-
		4. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. 023 11 K Dabo- Kote, B. 002 12 K Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek, C. 004 12 K Jl. Kebun Nenas					3	
		A. Lpju	Unit	-	-	-	25	-
		B. Marka Jalan	M'	-	-	-	12800	-
		C. Delinator	Unit	-	-	-	100	-
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	-	12	-
		F. Warning Light	Unit	-	-	-	10	-
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	510	-
		H. Rumlir Strip	Unit	-	-	-	-	-
		5. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. Jl. Daeng Celak, B. D.I Panjaitan						2
		A. Lpju	Unit	-	-	-	-	15
		B. Marka Jalan	M'	-	-	-	-	5200
		C. Delinator	Unit	-	-	-	-	65
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	-	-	6
		F. Warning Light	Unit	-	-	-	-	4
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	-	400
		H. Rumlir Strip	Unit	-	-	-	-	-
19	IKK 3.3.3 Peningkatan Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	1. Pemasangan ZoSS pada ruas jalan SDN 06 cemaga selatan	Laporan	1	1	1	1	1
		2 Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 001 cemaga	Lokasi	-	-	1	-	-
		3. Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 002 cemaga tengah	Lokasi	-	-	1	-	-
		4. Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 001 tanjung	Lokasi	-	-	1	-	-
		5 Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 001 bunguran timur	Lokasi	-	-	1	-	-
		6 Pemasangan RASS pada ruas jalan MTS BS Bunguran Selatan	Lokasi	-	-	1	-	-
		7 Pemasangan RASS pada ruas jalan SMPN 1 Bunguran Selatan	Lokasi	-	-	1	-	-
		8 Pemasangan RASS pada ruas jalan SD 03 Pengadah	Lokasi	-	-	1	-	-
20	IKK 3.4.1 Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang	1. Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Kepulauan Riau	Orang	1	1	1	1	1

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ							
21	IKK 3.4.2 Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	1. Pelaksanaan kegiatan SALUD di Kepulauan Riau	Orang	1	1	1	1	1
22	IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Kepulauan Riau	Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD	Kegiatan	3	4	3	3	4
		1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (RKAKL Pagu Kebutuhan / Pagu Indikatif / Pagu Alokasi / Pagu Anggaran / Asistensi Dengan Direktorat Teknis)	Kegiatan	1	1	1	1	1
		2. Rakornis Perencanaan dan Pembangunan BPTD Kepri	Kegiatan	1	1	1	1	1
		3. Konsinyering Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Anggaran Lingkungan BPTD Kelas I Kepulauan Riau	Kegiatan	1	1	1	1	1
		4. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (Penyusunan Renstra / Review Renstra)	Kegiatan	-	1	-	-	1
23	IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	NILAI	82,5	82,6	82,7	82,8	83
		1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan LKIP / Bimtek Penyusunan SAKIP LAKIP	Nilai	1	1	1	1	1
		2. Penyusunan SPIP dan Manajemen Resiko	Nilai	1	1	1	1	1
		3. Monitoring Kinerja Satuan Pelayanan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	12	12	12	12	12
		4. Pendampingan Angleb dan Nataru	Kegiatan	1	1	1	1	1
		5. Pendampingan Pimpinan Menteri Perhubungan RI / Dirjen / Sesdit / Direktur	Kegiatan	1	1	1	1	1
		6. Pendampingan Kunjungan Komisi V DPR RI	Kegiatan	1	1	1	1	1
24	IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD (Realisasi)	Persentase	95	95	97	98	99
		1. Pengelolaan Urusan Keuangan (Revisi, Realokasi dan Rekonsiliasi Keuangan / SAI)	Kegiatan	1	1	1	1	1
		2. Pengelolaan Urusan Keuangan (Evaluasi Pelaksanaan Anggaran)	Kegiatan	12	12	12	12	12
		3. Pengelolaan Urusan PNBP (Rekonsiliasi PNBP & EPA PNBP)	Kegiatan	2	2	2	2	2
		4. Kegiatan RK-BMN	Kegiatan	1	1	1	1	1
		5. Kegiatan Rekonsiliasi BMN	Kegiatan	3	3	3	3	3
		6. Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN)	Kegiatan	54	54	54	54	54
		7. Monitoring Aset Barang Milik Negara (BMN)	Kegiatan	54	54	54	54	54
		8. Kegiatan Penatausahaan Persediaan	Layanan	2	2	2	2	2
		9. Bimbingan Teknis Pemanfaat Aset Barang Milik Negara (BMN)	Kegiatan	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		10. Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN	Kegiatan	2	2	2	2	2
25	IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60	60	60	60	60
		1. Tindak Lanjut Temuan Rekomendasi BPK	%	60	60	60	60	60
		2. Tindak Lanjut Temuan Rekomendasi Itjen	%	60	60	60	60	60
26	IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80	80,5	81	81,5	82
		1. Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
		2. Pengembangan Kompetensi ASN						
		- Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	Orang	-	-	6	-	-
		- Diklat Penilai Andalalin	Orang	-	-	-	4	-
		- Diklat PPNS	Orang	-	-	-	20	-
		- Diklat SMKPAU	Orang	-	-	-	4	-
		- Diklat Bendahara	Orang	-	-	-	-	4
		- Diklat SAKIP	Orang	-	-	-	-	2
		- Diklat Barjas Level 1	Orang	-	-	-	-	5
		- Diklat Barjas Level 2	Orang	-	-	-	-	5
		- In House Training Keselamatan dan Lalu Lintas Transportasi Darat	Kegiatan	1	1	1	1	1
		- In House Training Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Kegiatan	1	1	1	1	1
		3. Sosialisasi Kehumasan	Kegiatan	1	1	1	1	1
		4. Update Data profil dan Dokumentasi PPID	Kegiatan	1	1	1	1	1
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kegiatan	1	1	1	1	1
		6. Zona Integritas (ZI) / Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Integritas	Kegiatan	1	1	1	1	1
		7. WBK WBBM	Usulan	1	1	1	1	1
		8. Pengelolaan Bidang Hukum						
		- Penyusunan peta bisnis dan SOP	Kegiatan	1	1	1	1	1
		- Tenaga Ahli/Konsultan Bidang Hukum/Advokasi/Pendampingan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1
		- Pembinaan Konseling Pegawai	Layanan	1	1	1	1	1
		- Persiapan dan Pembahasan Pengembangan Organisasi Satuan Pelayanan Lalu Lintas Jalan	Kegiatan	-	1	-	-	-
27	IKK 4.7 Peningkatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	10	20	13	9
		1. Pengadaan Laptop	Unit	-	-	-	20	-
		2. Pengadaan PC All In One	Unit	40	10	10	10	10
		3. Pengadaan Printer A3	Unit	-	3	-	-	-
		4. Pengadaan Printer Portable	Unit	-	2	2	2	2
		5. Pengadaan Printer Biasa	Unit	11	5	10	10	10
		6. Pengadaan Scanner	Unit	9	2	2	2	2
		7. Pengadaan Lemari Arsip	Unit	-	2	2	2	2
		8. Pengadaan Kursi Kerja	Unit	-	-	150	-	-
		9. Pengadaan Tempat Sampah Tiga Jenis Berbahan Stainless	Unit	-	-	72	-	-
		10. Pengadaan Gerobak Sampah	Unit	-	-	12	-	-
		11. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Penguji Kendaraan Bermotor Beserta Kelengkapannya	Stel	-	80	80	80	80
		12. Ruang Pengawasan dan Pemantauan Transportasi Darat Wilayah Kerja BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Paket	-	1	1	1	-

NO	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		13. Meteran Digital / Laser	Unit	-	3	-	-	-
		14. Tablet Siman Mobile	Unit	-	3	-	-	-
		18. Pembelian / Pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	-	-	25	-	-
		19. Pembelian / Pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	-	-	50	-	-
		20. Interior Kantor Induk BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Paket	-	-	1	-	-
		21. Pengadaan Bus Pegawai	Unit	-	-	-	-	1
		22. Pengadaan Kendaraan Jabatan Roda 4	Unit	-	-	-	1	-
		23. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	-	-	-	4	-
		24. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	-	-	-	8	-
		25. Pengadaan Mebeul Air Satpel	Paket	-	-	5	5	5
		25. Pengadaan Handy Talky	Unit	-	-	20	20	20
		26. Pengadaan Peralatan Kehumasan	Paket	-	-	1	-	-
		26. Perlengkapan dan Mebeulair Ruang Podcast	Paket	-	-	1	-	-
28	IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	8	9	9	9	9
		1. Gaji dan Tunjangan Pegawai (Belanja Pegawai)	Layanan	1	1	1	1	1
		2. Jiwa Korsa/Retreat	Kegiatan	1	1	1	1	1
		3. Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan	Laporan	1	1	1	1	1
		4. Sosialisasi kajian,rakor,pelaksanaan tentang organisasi tata laksana	Kegiatan	1	1	1	1	1
		5. Sosialisasi PP 94 Tentang Disiplin Pegawai (Satpel + Induk)	Kegiatan	1	1	1	1	1
		6. Sosialisasi E-Kinerja dan SIK (Satpel + Induk)	Kegiatan	1	1	1	1	1
		7. Penyusunan Pembaruan Data Pegawai	Kegiatan	1	1	1	1	1
		8. Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB+ABK)	Kegiatan	1	1	1	1	1
		9. Biaya Outsourcing	Kegiatan	-	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Tabel tersebut menyajikan indikator kegiatan, keluaran (output), serta target tahunan yang menjadi instrumen utama pengendalian kinerja BPTD Kelas II Kepulauan Riau untuk periode 2025–2029. Seluruh output dirancang secara terukur untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam menyelenggarakan operasional lalu lintas, angkutan jalan, serta sarana dan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan simpul transportasi, akuntabilitas kinerja manajerial, serta optimalisasi pemeliharaan aset negara guna menjamin keselamatan dan kelancaran arus transportasi darat. Sebagai unit pelaksana teknis, BPTD Kelas II Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat tata kelola birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis layanan, penguatan zona integritas di simpul-simpul transportasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pengguna jasa.

Penetapan target yang stabil setiap tahunnya mencerminkan komitmen kami terhadap kesinambungan fungsi pelayanan teknis dan dukungan administratif di daerah. Dengan demikian, tabel output Renstra ini berfungsi sebagai panduan manajerial bagi seluruh jajaran BPTD Kelas II Kepulauan Riau dalam memastikan konsistensi pelaksanaan

program, keterukuran capaian di lapangan, serta akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang handal di wilayah Kepulauan Riau.

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Tabel Kerangka Pendanaan Renstra BPTD Kelas II Kepulauan Riau disusun sebagai instrumen perencanaan strategis untuk memastikan keterpaduan antara sasaran program, indikator kinerja, keluaran kegiatan, dan alokasi anggaran selama periode 2025–2029. Kerangka ini menggambarkan komitmen BPTD Kelas II Kepulauan Riau dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan dan penganggaran yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tabel ini menjadi acuan penting bagi pengambilan keputusan manajerial serta pengendalian kinerja dan anggaran secara akuntabel dan transparan.

Secara lebih detail Target Indikator dan Kerangka Pendanaan disampaikan pada **tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Target Indikator dan Kerangka Pendanaan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
SP 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat					353,010,555		167,570,580		1,578,130,931		1,382,715,142		294,702,873
	IKK 1.1.2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan Jalan Angkutan Jalan	1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sembulang - Jodoh (Batam)	Trayek	1	916,592	1	854,697	1	916,592	1	916,592	1	916,592
		2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ranai - Cemaga - Selat Lampa (Natuna)	Trayek	1	1,013,128	1	926,406	1	1,013,128	1	1,013,128	1	1,013,128
		3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Kudung (Kab Lingga)	Trayek	1	746,571	1	706,699	1	746,571	1	746,571	1	746,571
		4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ranai - Batubi - Kelarik (Kab. Natuna)	Trayek	1	369,232	1	470,497	1	470,497	1	470,497	1	470,497
		5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Penarik (Kab. lingga)	Trayek	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Dabo - Jagoh (Kab. Lingga)	Trayek	1	408,540	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Tanjung Awak (Kab. Lingga)	Trayek	-	-	1	602,066	1	602,066	1	602,066	1	602,066
		8. Layanan Subsidi Perintis Trayek Dabo - Kuala Raya (Kab.Lingga)	Trayek	-	-	1	395,395	1	395,395	1	395,395	1	395,395
		9. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik - Penarik (Kab. Lingga)	Trayek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10. Layanan Subsidi Perintis Trayek Ranai- Kp. Tebing Tinggi (Kab. Natuna)	Trayek	-	-	-	-	1	900,000	1	900,000	1	900,000
		11. Layanan Subsidi Perintis Trayek Tugu Mtq - Pongkar (Kab. Karimun)	Trayek	-	-	-	-	1	600,000	1	600,000	1	600,000
		12. Layanan Subsidi Perintis Trayek Daik Lingga - Pansur (Kab. Lingga)	Trayek	-	-	-	-	1	800,000	1	800,000	1	800,000
		13. Layanan Subsidi Perintis Trayek Coastal Area-Bandara Raja Haji Abdullah-Stadion GOR Badang Pperkasa-Teluk Paku-Pasir Panjang (Kab.Karimun)	Trayek	-	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
	IKK 1.1.3B Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan	1. Layanan Subsidi Barang Trayek Pel. Lampa - Ranai	Trayek	1	7,660,829	1	7,660,829	1	7,660,829	1	7,660,829	1	7,660,829
		2. Pelabuhan Letung - Letung	Trayek	-	-	-	-	1	1,122,341	1	1,122,341	1	1,122,341

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
	Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan												
	IKK 1.1.3A Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	1. Layanan Angkutan KSPN Trayek Sei Carang - Ruas Sahera (Kab. Bintan)	Trayek	1	1,056,832	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Layanan Angkutan KSPN Trayek Tugu Sirih (Pelabuhan Sri Bintan Pura) - Patung Seribu - Terminal Sei Carang - Pulau Pucung (Pantai Trikora) - Simpang Lagoi - Kawasan Lagoi (PP)	Trayek	-	-	1	1,295,250	1	1,295,250	-	-	-	-
		3. Layanan Angkutan KSPN Trayek Tugu Sirih (Pelabuhan Sri Bintan Pura) - Kawasan Lagoi	Trayek	-	-	-	-	-	-	1	1,395,250	1	1,395,250
		4. Layanan Angkutan KSPN Trayek pelabuhan tanjung uban - lagoi	Trayek					1	1,195,250	1	1,195,250	1	1,195,250
	IKK 1.1.5 Jumlah Pembangunan terminal barang untuk mendukung konektivitas	1. Pembangunan Terminal Barang di Kepulauan Riau	Unit	-	-	-	-	-	-	1	30,000,000	1	30,000,000
		2. Pembangunan UPPKB di Bintan	Unit	-	-	-	-	1	19,919,125	1	20,000,000	-	-
		3. Pembangunan terminal tipe A di kepulauan riau	Unit	-	-	-	-	1	25,000,000	1	25,000,000	-	-
	IKK 1.2.2 Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Tarempa	Unit	-	-	-	-	1	34,436,249	1	34,436,249	-	-
		2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Serasan	Unit	-	-	-	-	-	-	1	25,000,000	1	34,436,249
		3. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Midai	Unit	-	-	-	-	1	25,882,095	1	20,000,000	-	-
	IKK 1.2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	1. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Dabo - Penarik	Lintasan	1	3,623,352	1	2,229,000	1	3,623,352	1	2,229,000	1	3,623,352
		2. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Tanjung Pinang - Dabo, Tanjung Pinang - Karimun	Lintasan	1	2,979,896	1	4,212,086	1	2,979,896	1	4,212,086	1	2,979,896
		3. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Tanjung Uban - Matak, Matak - Midai, Midai - Natuna, Natuna - Subi, Subi - Serasan, Serasan - Sintete	Lintasan	1	7,002,016	1	10,590,465	1	7,002,016	1	10,590,465	1	7,002,016

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		4. Layanan Subsidi Perintis ASDP Trayek Tanjung Uban - Tambelan, Tambelan - Sintete	Lintasan	1	11,385,237	1	10,864,330	1	11,385,237	1	10,864,330	1	11,385,237
SP 2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Darat -	IKK 2.1.5 Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Pembangunan Fasilitas Pendukung Perpindahan Penumpang (Bantuan Teknis)	Paket										
		Pembangunan Fasilitas Pendukung Perpindahan Penumpang (Halte dan Trotowar) di Batam	Paket	-	-	-	-	1	7,327,135	1	7,327,135	1	7,327,135
	IKK 2.1.9 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja	Kegiatan	2		3		3		3		3	
		2. Pengelolaan urusan keuangan dan PNBP serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi	Kegiatan	0		1		1		1		1	
		3. Pengelolaan Bidang Hukum Humas dan Umum	Kegiatan	7		7		7		7		7	
		4. Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan	Kegiatan	8		8		8		8		8	
		5. Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala	Kegiatan	14		14		14		14		14	
		1. pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		2. Pengendalian operasional lalu lintas jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		3. penyusunan dokumen andalalin	Kegiatan			1		1		1		1	
		4. Pemantauan Operasional Lalu Lintas Jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		5. Survey kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		6. Monitoring pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		7. Monitoring operasional dan perawatan teknologi rekayasa lalu lintas jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		8. Survey kebutuhan perlengkapan jalan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan			1		1		1		1	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		9. Survey lokasi daerah rawan kecelakaan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan			1		1		1		1	
		10. Survey bantuan teknis perlengkapan jalan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan			1		1		1		1	
		11. Survey kinerja lalu lintas jalan nasional di wilayah kepulauan riau	Kegiatan			1		1		1		1	
		12. Monitoring dan pemantauan lalu lintas jalan di jalan nasional wilayah kepulauan riau	Kegiatan			1		1		1		1	
		13. Monitoring dan pemantauan penyelenggaraan posko angkutan lebaran, natal, dan tahun baru di wilayah kepulauan riau	Kegiatan			1		1		1		1	
		15. Pengamatan dan pemantauan pemenuhan perlengkapan jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		16. Pengamatan dan pemantauan pemanfaatan bantuan teknis	Kegiatan			1		1		1		1	
		17. Pengamatan dan pemantauan kendaraan bermotor di jalan	Kegiatan			1		1		1		1	
		18. Monitoring dan evaluasi andalalin	Kegiatan			1		1		1		1	
		19. Survey pendahuluan dan kajian analisis dampak lalu lintas	Kegiatan			1		1		1		1	
	IKK 2.1.10 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	1. Kadian DED Kebutuhan dan existing perlengkapan jalan	Dokumen			1		1		1		1	
		2. Penyusunan dokumen PBG-SLF terminal tipe A kepulauan riau	Dokumen					1		1			
		3. DED taman edukasi	Dokumen					1		1			
	IKK 2.2.1 Jumlah Pelabuhan ASDP yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	1. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dabo	Unit	-	-	-	15,000,000	1	-	-	-	-	-
		2. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Dompok	Unit	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	1	-
		3. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sedanau	Unit	-	-	-	-	-	15,000,000	1	-	-	-

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
	IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	1. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	Unit	1	517,740	1	517,740	1	517,740	1	517,740	1	1
		2. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban	Unit	1	535,270	1	535,270	1	535,270	1	535,270	1	1
		3. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Balai Karimun	Unit	1	52,218	-	-	-	-	-	-	-	1
		4. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia	Unit	1	16,067	-	-	-	-	-	-	-	1
		5. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Dompok	Unit	1	50,512	-	-	-	-	-	-	-	1
		6. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Dabo	Unit	1	53,181	-	-	-	-	-	-	-	1
		7. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Penarik	Unit	1	171,674	-	-	1	-	1	-	1	1
		8. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tambelan	Unit	1	143,000	1	143,000	1	143,000	1	143,000	1	1
		9. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Matak	Unit	1	199,088	-	-	-	-	-	-	-	1
		10. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Penagi	Unit	1	50,512	-	-	-	-	-	-	-	1
		11. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Letung	Unit	1	228,798	1	228,798	1	228,798	1	228,798	1	1
		12. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau	Unit	1	263,000	1	263,000	1	263,000	1	263,000	1	1
		13. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2.2.6 Peningkatan Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	1. Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban	Unit	1	100,000	1	126,214	1	126,214	1	126,214	1	1
		2. Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	Unit	1	100,000	1	126,214	1	126,214	1	126,214	1	1
		3. Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB dan VHF di Pelabuhan Penyeberangan Letung, Penagi, Midai, Subi, Sedanau, Dabo, Dompok (Termasuk Supervisi)	Unit	-	-	-	8,400,000	1	-	-	-	-	-

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		4. Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB dan VHF di Pelabuhan Penyeberangan Matak, Tanjung Balai Karimun dan Tambelan (Termasuk Supervisi)	Unit	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1
		5. Pemeliharaan Radio SSB dan VHF di Pelabuhan Penyeberangan Matak, Tanjung Balai Karimun, Tambelan	Unit	-	-	-	450,000	1	-	-	-	-	-
	IKK 2.2.4 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	1. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Dabo	Kegiatan	-	-	-	30,000	1	-	-	-	-	-
		2. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Dompok	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	30,000	1	-
		3. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Sedanau	Kegiatan	-	-	-	-	-	30,000	1	-	-	-
		4. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Tarempa	Kegiatan	-	-	-	30,000	1	30,000	1	-	-	-
		5. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Serasan	Kegiatan	-	-	-	-	-	30,000	1	30,000	1	-
		6. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi SDP di Pelabuhan Midai	Kegiatan	-	-	-	30,000	1	30,000	1	-	-	-
		7 Monitoring trayek layanan angkutan penyeberangan perintis	Kegiatan	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	1
		8. Monitoring dan Pemantauan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Kegiatan	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	1
		9. Penegakkan hukum bidang SDP	Kegiatan	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	1
		10. Pemeriksaan kelaiklautan kapal SDP	Kegiatan										
		11. Monitoring operasional kapal SDP	Kegiatan										
		12. Pemeriksaan SPM kapal penyeberangan	Kegiatan										
		13. Penetapan jadwal operasional ASDP	Kegiatan										

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		14. Survey SPM di pelabuhan penyeberangan	Kegiatan										
		15. Survey kebutuhan penyediaan rambu sungai dan danau	Kegiatan										
SP 3 Meningkatnya keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKK 3.2.1 Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Pemenuhan Alat Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun (timbangan portable) Sarana Angkutan Jalan di Kepulauan Riau	Paket	-	-	-	800,000,000	1	800,000,000	1	-	-	-
		Pembangunan Taman Sadar Lalu Lintas (Taman Edukasi)	Paket	-	-	-	200,000,000	1	200,000,000	1	-	-	-
	IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Kepulauan Riau	Kegiatan	1	170,000	1	176,332	1	176,332	1	176,332	1	1
		2. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Non Statis Kendaraan Bermotor Non Statis	Kegiatan	1	170,000	1	170,000	1	170,000	1	170,000	1	1
	IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	1. Pengadaan Alat Kalibrasi di Kepulauan Riau	Paket	-	-	-	200,000,000	1	-	-	-	-	-
	IKK 3.3.1 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan (Bantuan Teknis)											
		a. LPJU	Unit	57	3,192,000	41	2,296,000	62	3,472,000	55	3,080,000	66	3,696,000
		b. Marka Jalan	M'	12130	473,070	17872	697,008	15300	596,700	14500	565,500	16100	627,900
		c. Delinator	Unit	420	420,000	373	373,000	300	300,000	345	345,000	350	350,000
		d. Guard rail	M'		0		0	200	580,000	245	710,500	350	1,015,000
		e. Rambu Lalu Lintas	Unit	437	1,311,000		0	200	600,000	152	456,000	175	525,000
		f. warning Light	Unit	7	597,191		0	5	426,565	7	597,191	9	767,817
		g. Tiang F / RPPJ	Unit	27	756,000		0	12	336,000	15	420,000	18	504,000
		h. Paku Jalan	Unit	804	356,976		0	1000	444,000	1200	532,800	1300	577,200
		2. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan (Bantuan Teknis)											
		a. LPJU	Unit			8	56,000						

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
	IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. Sp. Gesek (Km 16) Sp. Busung (Simpang Gereja St. Matias) , B. Jln. Wr Supratman (Sp. Rsup - Sp. Tugu Kebulatan, C. Sp. Busung - Sp. Lobam, D. Sp. Lobam - Tanjung Uban E. Jl. Basuki Rahmat F. Jl. A.Yani G. Sp. Parit Rampak - Sp. Parit Benut	Lokasi	4									
		a. LPJU	Unit	44	2,662,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Marka Jalan	M'	5700	222,300	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Delinator	Unit	310	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		d. Guard rail	M'	1030	2,987,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		e. Rambu Lalu Lintas	Unit	105	315,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		f. Warning light	Unit	34	2,900,642	-	-	-	-	-	-	-	-
		g. Paku Jalan	Unit	1417	629,148	-	-	-	-	-	-	-	-
		h. rumblr strip	Unit	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. 013.11.K Tanjung Balai - Sp. Meral	Lokasi			1							
		A. Lpju	Unit	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		B. Marka Jalan	M'	-	-	200	7,800	-	-	-	-	-	-
		C. Delinator	Unit	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	6	18,000	-	-	-	-	-	-
		F. Warning Light	Unit	-	-	2	170,626	-	-	-	-	-	-
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		H. Rumlbr Strip	Unit	-	-	4	7,200	-	-	-	-	-	-

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		3. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. 030 11 K Ranai - Sp. Tanjung, B. Sp. Kangka - Sp. Sialang	Lokasi					2					
		A. Lpju	Unit	-	-	-	-	8	484,000	-	-	-	-
		B. Marka Jalan	M'	-	-	-	-	1700	66,300	-	-	-	-
		C. Delinator	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	-	200	580,000	-	-	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	-	-	16	48,000	-	-	-	-
		F. Warning Light	Unit	-	-	-	-	12	1,023,756	-	-	-	-
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	-	130	57,720	-	-	-	-
		H. Rumlir Strip	Unit	-	-	-	-	12	21,600	-	-	-	-
		4. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. 023 11 K Dabo- Kote, B. 002 12 K Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek, C. 004 12 K Jl. Kebun Nenas								3			
		A. Lpju	Unit	-	-	-	-	-	-	25	1,512,500	-	-
		B. Marka Jalan	M'	-	-	-	-	-	-	12800	499,200	-	-
		C. Delinator	Unit	-	-	-	-	-	-	100	100,000	-	-
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	-	-	-	-	12	36,000	-	-
		F. Warning Light	Unit	-	-	-	-	-	-	10	853,130	-	-
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	-	-	-	510	226,440	-	-
		H. Rumlir Strip	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
		5. Pemasangan Lrk Pada Ruas Jalan Di A. Jl. Daeng Celak, B. D.I Panjaitan										2	
		A. Lpju	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	15	907,500
		B. Marka Jalan	M'	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	202,800

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		C. Delinator	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65,000
		D. Guard Rail	M'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		E. Rambu Lalu Lintas	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18,000
		F. Warning Light	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	4	341,252
		G. Paku Jalan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	400	177,600
		H. Rumlir Strip	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	IKK 3.3.3 Peningkatan Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	1. Pemasangan ZoSS pada ruas jalan SDN 06 cemaga selatan	Laporan	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		2 Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 001 cemaga	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		3. Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 002 cemaga tengah	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		4. Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 001 tanjung	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		5 Pemasangan RASS pada ruas jalan SDN 001 bunguran timur	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		6 Pemasangan RASS pada ruas jalan MTS BS Bunguran Selatan	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		7 Pemasangan RASS pada ruas jalan SMPN 1 Bunguran Selatan	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
		8 Pemasangan RASS pada ruas jalan SD 03 Pengadah	Lokasi	-	-	-	-	1	350,000	-	-	-	-
	P IKK 3.4.1 Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	1. Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Kepulauan Riau	Orang	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000
	IKK 3.4.2 Jumlah kegiatan SALUD	1. Pelaksanaan kegiatan SALUD di Kepulauan Riau	Orang	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
	yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ												
SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Kepulauan Riau	Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD	Kegiatan	3		4		3		3		4	
		1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (RKAKL Pagu Kebutuhan / Pagu Indikatif / Pagu Alokasi / Pagu Anggaran / Asistensi Dengan Direktorat Teknis)	Kegiatan	1	463,250	1	473,250	1	483,250	1	493,250	1	503,250
		2. Rakornis Perencanaan dan Pembangunan BPTD Kepri	Kegiatan	1	250,000	1	260,000	1	270,000	1	280,000	1	290,000
		3. Konsinyering Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Anggaran Lingkungan BPTD Kelas I Kepulauan Riau	Kegiatan	1	250,000	1	260,000	1	270,000	1	280,000	1	290,000
		4. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (Penyusunan Renstra / Review Renstra)	Kegiatan	-	-	1	46,000	-	-	-	-	1	55,000
	IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	NILAI	82,5		82,6		82,7		82,8		83	
		1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan LKIP / Bimtek Penyusunan SAKIP LAKIP	Nilai	1	107,000	1	117,000	1	127,000	1	137,000	1	147,000
		2. Penyusunan SPIP dan Manajemen Resiko	Nilai	1	41,000	1	51,000	1	61,000	1	71,000	1	81,000
		3. Monitoring Kinerja Satuan Pelayanan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	12	615,000	12	625,000	12	635,000	12	645,000	12	655,000
		4. Pendampingan Angleb dan Nataru	Kegiatan	1	50,000	1	55,000	1	60,000	1	65,000	1	70,000
		5. Pendampingan Pimpinan Menteri Perhubungan RI / Dirjen / Sesdit / Direktur	Kegiatan	1	50,000	1	55,000	1	60,000	1	65,000	1	70,000
		6. Pendampingan Kunjungan Komisi V DPR RI	Kegiatan	1	50,000	1	55,000	1	60,000	1	65,000	1	70,000
	IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD (Realisasi)	Persentase	95		95		97		98		99	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
Pelaksanaan Anggaran		1. Pengelolaan Urusan Keuangan (Revisi, Realokasi dan Rekonsiliasi Keuangan / SAI)	Kegiatan	1	100,000	1	120,000	1	130,000	1	140,000	1	150,000
		2. Pengelolaan Urusan Keuangan (Evaluasi Pelaksanaan Anggaran)	Kegiatan	12	100,000	12	120,000	12	130,000	12	140,000	12	150,000
		3. Pengelolaan Urusan PNBP (Rekonsiliasi PNBP & EPA PNBP)	Kegiatan	2	100,000	2	120,000	2	130,000	2	140,000	2	150,000
		4. Kegiatan RK-BMN	Kegiatan	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
		5. Kegiatan Rekonsiliasi BMN	Kegiatan	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000
		6. Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN)	Kegiatan	54	972,000	54	972,000	54	972,000	54	972,000	54	972,000
		7. Monitoring Aset Barang Milik Negara (BMN)	Kegiatan	54	972,000	54	972,000	54	972,000	54	972,000	54	972,000
		8. Kegiatan Penatausahaan Persediaan	Layanan	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000
		9. Bimbingan Teknis Pemanfaat Aset Barang Milik Negara (BMN)	Kegiatan	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000
		10. Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN	Kegiatan	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000
IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)		Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60		60		60		60		60	
		1. Tindak Lanjut Temuan Rekomendasi BPK	%	60	150,000	60	170,000	60	190,000	60	210,000	60	230,000
		2. Tindak Lanjut Temuan Rekomendasi Itjen	%	60	150,000	60	170,000	60	190,000	60	210,000	60	230,000
IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat		Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80		80,5		81		81,5		82	
		1. Layanan Perkantoran	Layanan	1	7,100,000	1	7,500,000	1	7,900,000	1	8,300,000	1	8,700,000
		2. Pengembangan Kompetensi ASN											
		- Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	Orang	-	-	-	-	6	609,956	-	-	-	-
		- Diklat Penilai Andalalin	Orang	-	-	-	-	-	-	4	32,640	-	-
		- Diklat PPNS	Orang	-	-	-	-	-	-	20	519,500	-	-
		- Diklat SMKPAU	Orang	-	-	-	-	-	-	4	23,920	-	-

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		- Diklat Bendahara	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23,920
		- Diklat SAKIP	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13,320
		- Diklat Barjas Level 1	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	44,550
		- Diklat Barjas Level 2	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	94,900
		- In House Training Keselamatan dan Lalu Lintas Transportasi Darat	Kegiatan	1	315,000	1	320,000	1	325,000	1	330,000	1	335,000
		- In House Training Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Kegiatan	1	315,000	1	320,000	1	325,000	1	330,000	1	335,000
		3. Sosialisasi Kehumasan	Kegiatan	1	123,460	1	125,460	1	127,460	1	129,460	1	131,460
		4. Update Data profil dan Dokumentasi PPID	Kegiatan	1	193,980	1	195,980	1	197,980	1	199,980	1	211,980
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kegiatan	1	193,980	1	195,980	1	197,980	1	199,980	1	211,980
		6. Zona Integritas (ZI) / Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Integritas	Kegiatan	1	15,224	1	20,224	1	25,224	1	30,224	1	35,224
		7. WBK WBBM	Usulan	1	15,224	1	20,224	1	25,224	1	30,224	1	35,224
		8. Pengelolaan Bidang Hukum											
		- Penyusunan peta bisnis dan SOP	Kegiatan	1	157,424	1	160,424	1	163,424	1	166,424	1	169,424
		- Tenaga Ahli/Konsultan Bidang Hukum/Advokasi/Pendampingan Hukum	Layanan	1	475,000	1	500,000	1	525,000	1	550,000	1	575,000
		- Pembinaan Konseling Pegawai	Layanan	1	310,000	1	320,000	1	330,000	1	340,000	1	350,000
		- Persiapan dan Pembahasan Pengembangan Organisasi Satuan Pelayanan Lalu Lintas Jalan	Kegiatan	-	-	1	160,424	-	-	-	-	-	-
	IKK 4.7 Peningkatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3		10		20		13		9	
		1. Pengadaan Laptop	Unit	-	-	-	-	-	-	20	500,000	-	-
		2. Pengadaan PC All In One	Unit	40	840,000	10	210,000	10	210,000	10	210,000	10	210,000
		3. Pengadaan Printer A3	Unit	-	-	3	30,000	-	-	-	-	-	-
		4. Pengadaan Printer Portable	Unit	-	-	2	20,000	2	25,000	2	30,000	2	35,000
		5. Pengadaan Printer Biasa	Unit	11	55,000	5	25,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
		6. Pengadaan Scanner	Unit	9	68,400	2	15,200	2	15,200	2	15,200	2	15,200
		7. Pengadaan Lemari Arsip	Unit	-	-	2	25,000	2	27,000	2	29,000	2	31,000
		8. Pengadaan Kursi Kerja	Unit	-	-	-	-	150	375,000	-	-	-	-
		9. Pengadaan Tempat Sampah Tiga Jenis Berbahan Stainless	Unit	-	-	-	-	72	720,000	-	-	-	-
		10. Pengadaan Gerobak Sampah	Unit	-	-	-	-	12	120,000	-	-	-	-
		11. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Penguji Kendaraan Bermotor Beserta Kelengkapannya	Stel	-	-	80	32,000	80	37,000	80	42,000	80	47,000
		12. Ruang Pengawasan dan Pemantauan Transportasi Darat Wilayah Kerja BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Paket	-	-	1	5,500,000	1	4,000,000	1	3,000,000	-	-
		13. Meteran Digital / Laser	Unit	-	-	3	15,000	-	-	-	-	-	-
		14. Tablet Siman Mobile	Unit	-	-	3	75,000	-	-	-	-	-	-
		18. Pembelian / Pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	-	-	-	-	25	18,750,000	-	-	-	-
		19. Pembelian / Pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	-	-	-	-	50	25,000,000	-	-	-	-
		20. Interior Kantor Induk BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Paket	-	-	-	-	1	5,000,000	-	-	-	-
		21. Pengadaan Bus Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
		22. Pengadaan Kendaraan Jabatan Roda 4	Unit	-	-	-	-	-	-	1	690,885	-	-
		23. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	-	-	-	-	-	-	4	2,030,330	-	-
		24. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	-	-	-	-	-	-	8	316,112	-	-
		25. Pengadaan Mebeul Air Satpel	Paket	-	-	-	-	5	1,500,000	5	1,750,000	5	2,000,000
		25. Pengadaan Handy Talky	Unit	-	-	-	-	20	60,000	20	70,000	20	80,000
		26. Pengadaan Peralatan Kehumasan	Paket	-	-	-	-	1	200,000	-	-	-	-
		26. Perlengkapan dan Mebeulair Ruang Podcast	Paket	-	-	-	-	1	200,000	-	-	-	-

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KRO/RO/KEGIATAN	SATUAN	2025		2026		2027		2028		2029	
				RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)	RO	Rp (X 1000)
	IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	8		9		9		9		9	
		1. Gaji dan Tunjangan Pegawai (Belanja Pegawai)	Layanan	1	78,450,000	1	98,450,000	1	108,450,000	1	118,450,000	1	128,450,000
		2. Jiwa Korsa/Retreat	Kegiatan	1	280,000	1	290,000	1	300,000	1	310,000	1	330,000
		3. Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan	Laporan	1	225,000	1	235,000	1	245,000	1	255,000	1	265,000
		4. Sosialisasi kajian,rakor,pelaksanaan tentang organisasi tata laksana	Kegiatan	1	157,000	1	160,000	1	163,000	1	166,000	1	169,000
		5. Sosialisasi PP 94 Tentang Disiplin Pegawai (Satpel + Induk)	Kegiatan	1	310,000	1	313,000	1	316,000	1	319,000	1	322,000
		6. Sosialisasi E-Kinerja dan SIK (Satpel + Induk)	Kegiatan	1	315,000	1	318,000	1	321,000	1	324,000	1	327,000
		7. Penyusunan Pembaruan Data Pegawai	Kegiatan	1	35,000	1	37,000	1	39,000	1	41,000	1	43,000
		8. Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB+ABK)	Kegiatan	1	35,000	1	37,000	1	39,000	1	41,000	1	43,000
		9. Biaya Outsourcing	Kegiatan	-	-	1	500,000	1	550,000	1	600,000	1	650,000

Tabel Kerangka Pendanaan Renstra Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat menyajikan rincian keterkaitan antara sasaran program, indikator kegiatan, KRO/RO/kegiatan, serta proyeksi pendanaan tahunan pada periode 2025–2029. Setiap sasaran strategis diterjemahkan ke dalam indikator yang terukur, kemudian dioperasionalkan melalui rangkaian kegiatan lintas unit kerja. Alokasi anggaran disusun secara bertahap dan berjenjang untuk menjamin kesinambungan program, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Selain itu, tabel ini juga mencerminkan prinsip *value for money* dengan menyeimbangkan antara kebutuhan belanja operasional, pengembangan SDM, digitalisasi layanan, dan penguatan fungsi pengawasan. Melalui kerangka pendanaan ini, diharapkan pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan target kinerja tahunan, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian dan penyesuaian kebijakan penganggaran pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya

4.2.2 Skema Pendanaan

Sumber Pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau pada Tahun 2025-2029 agar tercapainya sasaran-sasaran strategis pada Program Dukungan Manajemen adalah bersumber dari APBN (Rupiah Murni). Pendanaan akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pada berbagai aspek untuk mendukung kegiatan strategis bidang perhubungan darat selama periode 2025-2029.

4.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dalam Renstra BPTD Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen pengendalian strategis untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja secara efektif dan akuntabel. Matriks ini mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pengelolaan risiko juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal guna menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan transportasi darat di Kepulauan Riau.

Tabel 4.4 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra BPTD Kelas II Kepulauan Riau

5

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO TINGKAT BPTD KELAS II KEPULAUAN RIAU
SP 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	IKP 1.1 Rasio konektivitas transportasi Jalan	IKK 1.1.2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Layanan subsidi tidak tepat sasaran / load factor rendah	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Terjadi karena data kebutuhan perjalanan tidak mutakhir sehingga trayek dan jadwal tidak sesuai kondisi lapangan.	Program subsidi menjadi kurang efektif dan pemanfaatan anggaran tidak optimal.	• Survei kebutuhan masyarakat secara berkala • Evaluasi rute dan jadwal layanan • Koordinasi dengan Pemda dan Dishub daerah
		IKK 1.1.3B Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan	Layanan subsidi tidak termanfaatkan optimal	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Terjadi karena data kebutuhan logistik tidak memadai dan rute belum sesuai jalur distribusi barang.	Distribusi logistik tidak efektif dan biaya distribusi meningkat.	• Penyusunan kajian kebutuhan logistik • Evaluasi periodik trayek subsidi • Koordinasi dengan Pemda & pelaku usaha
		IKK 1.1.3A Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	Integrasi antarmoda tidak berjalan optimal	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Keterbatasan sarana prasarana pendukung Belum adanya standar layanan antarmoda yang baku Koordinasi stakeholder belum maksimal	Konektivitas KSPN terganggu Penurunan minat wisatawan Target kinerja tidak tercapai	• Koordinasi dengan pengelola KSPN • Penyusunan SOP layanan • Monitoring berkala
		IKK 1.1.5 Jumlah Pembangunan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Terminal barang tidak optimal beroperasi / tidak sesuai fungsinya	Kepala BPTD & Kasi Prasarana	Lokasi kurang strategis dan dukungan operasional terbatas.	Aset negara tidak termanfaatkan Efektivitas konektivitas logistik menurun	• Penentuan lokasi berbasis kajian • Kerja sama dengan pelaku usaha • Optimalisasi pengelolaan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO TINGKAT BPTD KELAS II KEPULAUAN RIAU
SP 2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Darat	IKP 1.2 Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	IKK 1.2.2 Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	Pelabuhan belum mendukung konektivitas secara optimal	Kepala BPTD & Kasi Prasarana	Fasilitas pelabuhan belum lengkap dan kapasitas pelayanan terbatas.	Mobilitas masyarakat terganggu dan konektivitas antarwilayah menurun.	- Pengembangan fasilitas bertahap - Evaluasi operasional - Koordinasi keselamatan dan cuaca
		IKK 1.2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	Subsidi tidak efektif / pemanfaatan rendah	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Data kebutuhan pengguna tidak akurat dan jadwal layanan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.	Pemanfaatan subsidi rendah dan dampak layanan tidak optimal.	- Survei kebutuhan pengguna - Penyesuaian jadwal dan lintasan - Sosialisasi layanan
	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Jalan	IKK 2.1.5 Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Fasilitas belum memenuhi SPM	Kepala BPTD & Kasi Prasarana	Pembangunan fasilitas dilakukan bertahap dengan keterbatasan sumber daya.	Pelayanan tidak optimal dan kepuasan masyarakat menurun	- Pengembangan fasilitas bertahap - Evaluasi operasional - Koordinasi keselamatan dan cuaca
		IKK 2.1.9 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Pengawasan dan evaluasi tidak berjalan efektif	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Keterbatasan SDM dan data evaluasi kurang akurat.	Kualitas layanan tidak meningkat dan permasalahan tidak tertangani.	- Penguatan sistem monitoring - Optimalisasi pelaporan berbasis data - Evaluasi berkala
		IKK 2.1.10 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen teknis tidak lengkap / tidak tepat waktu	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Koordinasi kurang optimal dan perencanaan tidak terjadwal dengan baik.	Pelaksanaan tugas tidak terarah dan pengambilan keputusan kurang efektif.	- Penyusunan jadwal kerja yang jelas - Penguatan koordinasi internal - Review dokumen secara rutin
	IKP 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	IKK 2.2.1 Jumlah Pelabuhan ASDP yang ditingkatkan	Pelayanan pelabuhan belum memenuhi standar	Kepala BPTD & Kasi Prasarana	Fasilitas dan layanan belum sepenuhnya sesuai standar minimal.	Kepuasan pengguna menurun dan kualitas pelayanan terganggu.	Peningkatan fasilitas pelayanan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO TINGKAT BPTD KELAS II KEPULAUAN RIAU
	(IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi ASDP	pelayanannya untuk memenuhi SPM					- Evaluasi pencapaian SPM - Pembenahan pelayanan operasional
		IKK 2.2.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	Operasional layanan tidak konsisten dengan standar	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Pengaturan operasional belum optimal dan pengawasan terbatas.	Pelayanan menjadi tidak stabil dan menurunkan kepercayaan pengguna.	- Penguatan tata kelola operasional - Pengawasan rutin - Evaluasi kepatuhan SPM
		IKK 2.2.6 Peningkatan Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Pengawasan OTP tidak optimal	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Pelaksanaan pengawasan belum maksimal dan keterbatasan fasilitas.	Potensi gangguan keselamatan dan pelayanan menjadi lebih tinggi.	- Penguatan mekanisme pengawasan - Penyediaan dukungan teknis - Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan OTP
		IKK 2.2.4 Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	Monitoring peningkatan pelayanan tidak efektif	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Sistem pengawasan belum optimal dan pelaporan tidak konsisten.	Peningkatan pelayanan tidak terkontrol dan target tidak tercapai.	- Penguatan sistem monev - Optimalisasi pelaporan - Evaluasi periodik
SP 3 Meningkatnya keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKP 3 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKK 3.2.1 Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Pemeriksaan tidak optimal / tidak sesuai pedoman	epala BPTD & Kasi Sarana	Pengawasan tidak maksimal dan kepatuhan pengguna rendah.	Kendaraan tidak laik jalan dan risiko kecelakaan meningkat.	- Pengetatan pemeriksaan - Penguatan pengawasan lapangan - Edukasi pengguna
		IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Alat uji tidak akurat / tidak terkalibrasi	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Jadwal kalibrasi tidak konsisten dan keterbatasan fasilitas.	Hasil uji tidak valid dan keselamatan berpotensi terganggu.	- Penjadwalan kalibrasi rutin - Penguatan pengelolaan peralatan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO TINGKAT BPTD KELAS II KEPULAUAN RIAU
							Monitoring kepatuhan kalibrasi
		IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	Keterlambatan atau kekurangan sarana uji kalibrasi	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Proses pengadaan belum optimal dan perencanaan kurang matang.	Pelaksanaan uji dan tidak terganggu keselamatan terjamin.	- Perencanaan pengadaan yang tepat waktu - Koordinasi penganggaran - Monitoring kebutuhan peralatan
		IKK 3.3.1 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	Perlengkapan jalan tidak sesuai standar	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Keterbatasan anggaran dan pemasangan bertahap.	Potensi kecelakaan meningkat dan keselamatan menurun.	- Prioritas pemasangan berbasis risiko - Evaluasi lokasi rawan - Pemenuhan spesifikasi teknis
		IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	Penanganan lokasi rawan kecelakaan tidak optimal	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Intervensi belum menyeluruh dan keterbatasan sumber daya.	Tingkat kecelakaan berpotensi tetap tinggi.	- Penentuan prioritas LRK - Pelaksanaan intervensi sesuai pedoman - Monitoring hasil penanganan
		IKK 3.3.3 Peningkatan Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	Pengendalian kecepatan tidak efektif	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Sarana pengendalian kecepatan kurang dan kepatuhan rendah.	Risiko kecelakaan meningkat.	- Penataan manajemen kecepatan - Pengawasan dan edukasi - Penerapan sesuai pedoman

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO TINGKAT BPTD KELAS II KEPULAUAN RIAU
		IKK 3.4.1 Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Pelaksanaan tidak optimal dan dampak sosialisasi rendah	Kepala BPTD & Kasi Sarana	Koordinasi dan pelaksanaan belum maksimal.	Kesadaran keselamatan masyarakat rendah.	- Perencanaan kegiatan yang efektif - Pelibatan stakeholder - Evaluasi hasil sosialisasi
SP 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 3.4.2 Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Program tidak berjalan optimal	Kepala BPTD & Kasi Lalu Lintas	Pelaksanaan dan koordinasi terbatas.	Pemahaman keselamatan anak rendah.	- Penguatan kerja sama sekolah - Pelaksanaan berkelanjutan
		IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Kepulauan Riau	Perencanaan tidak tepat sasaran	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Penyelarasan perencanaan belum optimal.	Program tidak efektif.	- Sinkronisasi dengan pusat & daerah - Evaluasi perencanaan
		IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Akuntabilitas kinerja tidak meningkat	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Pengelolaan kinerja belum optimal.	Nilai SAKIP menurun.	- Penguatan manajemen kinerja - Monitoring capaian
		IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Serapan anggaran rendah / tidak optimal	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Perencanaan anggaran kurang efektif.	Capaian kinerja menurun.	- Perencanaan cashflow yang baik - Monitoring serapan anggaran
		IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti optimal	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Monitoring tindak lanjut belum maksimal.	Risiko administrasi dan reputasi meningkat.	- Monitoring berkala - Penyelesaian sesuai target

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO TINGKAT BPTD KELAS II KEPULAUAN RIAU
		IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Nilai Zona Integritas tidak tercapai	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Implementasi pembangunan ZI belum optimal.	Reformasi birokrasi tidak berkembang maksimal.	- Penguatan budaya kerja - Pembangunan ZI berkelanjutan
		IKK 4.7 Peningkatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan tidak sesuai regulasi	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Kepatuhan prosedur belum optimal.	Potensi permasalahan hukum dan administrasi.	- Kepatuhan regulasi - Pengawasan pengadaan
		IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Pengelolaan SDM tidak berbasis kinerja	Kepala BPTD & Kasi Tata Usaha	Sistem merit belum diterapkan optimal.	Kinerja organisasi tidak berkembang maksimal.	- Penerapan merit system - Evaluasi kinerja SDM

Matriks Manajemen Risiko ini disusun dengan pendekatan kolaboratif antara Kepala BPTD dan para pemilik risiko di tingkat seksi, yaitu Seksi Lalu Lintas, Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Tata Usaha. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik penyelenggaraan transportasi darat dan penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau yang bersifat kepulauan, multisektor, serta memerlukan sinergi lintas pemangku kepentingan. Selain unit internal BPTD, pengelolaan risiko juga melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, operator transportasi, UPT terkait, serta dukungan kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut menjadi penting khususnya pada risiko yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah, penyediaan layanan subsidi transportasi, peningkatan standar pelayanan publik, peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Setiap risiko dalam matriks ini dianalisis secara sistematis dengan menguraikan penyebab, akibat, serta strategi mitigasi yang terukur dan realistis untuk dilaksanakan oleh masing-masing pemilik risiko sesuai tugas dan fungsi BPTD Kelas II Kepulauan Riau. Pendekatan ini memungkinkan penguatan koordinasi pelaksanaan program, peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, matriks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen penguatan pelayanan transportasi darat dan penyeberangan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan transportasi darat di wilayah Kepulauan Riau secara berkelanjutan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan transportasi darat pada khususnya dan pembangunan nasional di segala bidang pada umumnya, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara dalam lima tahun ke depan.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau 2025-2029 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja Bagian di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.

Selanjutnya, kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan, khususnya dari level di atasnya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2027) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).